



Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah 2019

## Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah 2019

# Meningkatkan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Syariah di Era Digital



Direktorat Pasar Modal Syariah  
Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikoesoemo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710  
Telp : (021) 296 0000 Ext. 6595  
Fax : (021) 385 7917  
E-mail : dpms@ojk.go.id





**PASAR  
MODAL  
SYARIAH**

*Berinvestasi yang Amanah*

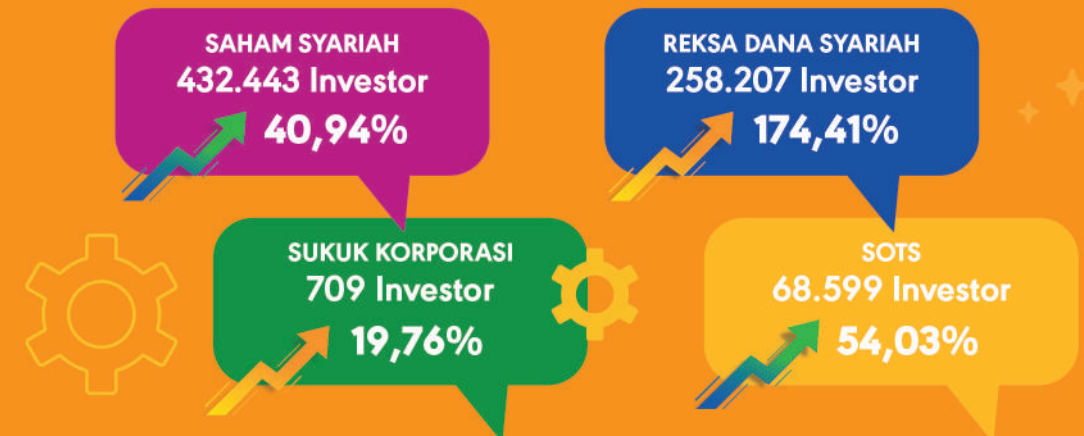
# Trending 2019



# Sosial Media Pasar Modal Syariah



# Data Kepemilikan Efek Syariah





# Daftar Isi

## I. Kiprah Keuangan Syariah Indonesia di Pasar Global

Islamic Finance Country Index (IFCI)  
 Islamic Finance Development Indicator (IFDI)  
 State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020  
 Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC)  
 The Best Islamic Capital Market Award 2019  
 Indonesia Sebagai Negara Pertama Penerbit Sovereign Green Sukuk Retail

11

## II. Program Unggulan Pengembangan Pasar Modal Syariah 2019

### 1. LITERASI DIGITAL PASAR MODAL SYARIAH

Youtube Pasar Modal syariah  
 Instagram @pasar\_modal\_syariah  
 Facebook Pasar Modal Syariah  
 Website Aku Cinta Keuangan Syariah

### 2. PENYUSUNAN MODUL PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

### 3. PEMANFAATAN SUKUK WAKAF DAN SUKUK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDANAAN PILIHAN

Pendampingan terhadap Pihak yang Berminat Menerbitkan Sukuk Wakaf  
 Pemetaan Potensi Penerbitan Sukuk Daerah

19

## III. Program Pengembangan Pasar Modal Syariah 2019

### 1. PENGUATAN KEBIJAKAN

Revisi POJK Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah  
 Revisi POJK Nomor 16 tahun 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)  
 Kajian dalam rangka Penyusunan Roadmap Pasar Modal Syariah

### 2. PENGEMBANGAN PRODUK

Kajian Implementasi Produk Reksa Dana Syariah Berbasis Pertanian  
 Kajian Pengaruh Penerbitan DES terhadap Pergerakan Harga Saham  
 Kajian Penerapan Special Purpose Vehicle (SPV) pada Penerbitan Produk Pasar Modal Syariah

39

## IV. Seminar, Sosialisasi, dan Penyuluhan serta Sinergi Pemangku Kepentingan Pasar Modal Syariah

### 1. SEMINAR, SOSIALISASI, DAN PENYULUHAN

Penyelenggaraan Workshop bagi Pelaku Pasar Modal Syariah  
 Penyuluhan Pasar Modal Syariah  
 Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah  
 Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi

### 2. SINERGI PEMANGKU KEPENTINGAN PASAR MODAL SYARIAH

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
 Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)  
 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)  
 Bursa Efek Indonesia

55

## V. Produk dan Layanan Pasar Modal Syariah

### 1. PRODUK PASAR MODAL SYARIAH

Saham Syariah  
 Sukuk Korporasi  
 Reksa Dana Syariah  
 Surat Berharga Syariah Negara  
 Investor di Pasar Modal Syariah

### 2. LAYANAN DI PASAR MODAL SYARIAH

Manajer Investasi Syariah (MIS) dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS)  
 Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES)  
 Bank Kustodian untuk Reksa Dana Syariah  
 Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)  
 Sistem Online Trading Syariah (SOTS)

73

## VI. Lampiran

Lampiran 1 (Sukuk Korporasi Terbit Tahun 2019)  
 Lampiran 2 (Sukuk Korporasi Jatuh Tempo Tahun 2019)  
 Lampiran 3 (Daftar Manajer Investasi yang Mengelola Reksa Dana Syariah per 31 Desember 2019)  
 Lampiran 4 (Daftar Ahli Syariah Pasar Modal per 31 Desember 2019)

103

## Sambutan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal



Selain nilai dan jumlah produk yang mengalami peningkatan, tingkat inklusi produk pasar modal syariah pun meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkan produk syariah di pasar modal sebagai sarana berinvestasi.



## Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi ALLAH SWT atas limpahan nikmat dan ridho-Nya kepada kita sehingga industri pasar modal syariah dapat tumbuh dan terus berkembang.

Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh stakeholders antara lain DSN-MUI, kementerian dan lembaga terkait, pelaku industri, dan organisasi masyarakat yang telah berkontribusi dalam pengembangan pasar modal syariah.

Selama tahun 2019, pasar modal syariah tetap bertumbuh di tengah kinerja pasar yang kurang menguntungkan, sebagai dampak dari kondisi ekonomi global dan domestik. Data menunjukkan bahwa kapitalisasi saham syariah di akhir 2019 sebesar Rp3.744,82 triliun dimana mengalami kenaikan tipis sebesar 2,13% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, produk syariah yang mengalami pertumbuhan paling besar adalah reksa dana syariah, diikuti sukuk korporasi dan sukuk negara. Pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah sebesar 55,80% dan nilai sukuk korporasi beredar sebesar 40,05%. Sementara itu pertumbuhan nilai sukuk negara beredar sebesar 14,82%. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa industri pasar modal syariah turut memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia.



Selain nilai dan jumlah produk yang mengalami peningkatan, tingkat inklusi produk pasar modal syariah pun meningkat. Data menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan reksa dana syariah per 30 Desember 2019 meningkat sebesar 174,41% dibandingkan tahun sebelumnya, kepemilikan sukuk korporasi meningkat sebesar 19,76%, dan investor yang menggunakan sistem online trading syariah meningkat 54,03%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkan produk syariah di pasar modal sebagai sarana berinvestasi.

Pertumbuhan dari sisi produk dan investor yang telah dicapai terus mendorong OJK melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan kebijakan yang dapat menstimulus pertumbuhan industri, melalui inovasi produk dan bentuk upaya lainnya. Sejalan dengan isu terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang tengah menjadi perhatian dunia internasional, industri pasar modal syariah juga mendukung hal tersebut. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan pengembangan produk berbasis filantropi Islam, yaitu sukuk *linked* wakaf, yang lebih dikenal dengan sukuk wakaf. Penerbitan sukuk wakaf tersebut akan menghasilkan nilai tambah berupa optimalisasi aset wakaf yang akan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat wakaf. Oleh karena itu, hal ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar semakin banyak pihak yang berminat untuk menerbitkan sukuk wakaf.

Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan industri pasar modal syariah Indonesia melalui sinergi dengan *stakeholders*. Salah satu bentuk sinergi yang dapat dilakukan adalah berkolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah. Selanjutnya, kami juga mengajak semua pihak untuk menjaga kepercayaan publik kepada pasar modal syariah. Dengan demikian, pasar modal syariah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas sebagai perwujudan dari *rahmatan lil alaamiin*.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Hoesen

## Kata Pengantar



Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berdampak positif pada perkembangan industri pasar modal syariah. Semoga pasar modal syariah dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, berkeadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat.



**Fadilah Kartikasasi**  
Direktur Pasar Modal Syariah

## Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah 2019 telah diselesaikan. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan dalam menerapkan kehidupan bemuamalah yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Penyusunan Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah 2019 ini sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi perkembangan industri pasar modal syariah Indonesia kepada seluruh stakeholder dan masyarakat. Informasi tersebut mencakup capaian, strategi sosialisasi dan edukasi, penerbitan regulasi, *market outlook*, hingga kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan industri pasar modal syariah Indonesia.

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir implementasi roadmap pasar modal syariah 2015-2019 yang merupakan acuan strategi pengembangan industri pasar modal syariah di Indonesia selama lima tahun terakhir. Dapat kami sampaikan bahwa hingga akhir periode tersebut, hampir seluruh program yang tertuang dalam roadmap tersebut telah dilaksanakan dengan baik, dan berdampak positif bagi perkembangan industri pasar modal syariah Indonesia.



Selanjutnya, dari sisi penguatan regulasi, pada tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan revisi Peraturan terkait reksa dana syariah. Penerbitan regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi industri pasar modal syariah Indonesia. Dari sisi pengembangan produk dan infrastruktur, selain melakukan sebanyak lima kajian, OJK telah mengembangkan produk syariah di pasar modal berbasis filantropi berupa sukuk wakaf.

Sebagai salah satu strategi memasyarakatkan pasar modal syariah, selain melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, OJK juga telah menjalankan strategi sosialisasi melalui berbagai media sosial. Di tahun 2019, sudah dibuat youtube channel guna memperluas sosialisasi melalui media sosial, selain instagram, facebook, dan *website* yang sudah ada sebelumnya. Adapun capaian dari sosialisasi melalui sosial media tersebut berupa peningkatan *subscriber* maupun *follower* yang signifikan dari tahun ke tahun, dan diharapkan akan terus bertumbuh di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, dalam rangka mewujudkan *link and match* antara materi pengajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan SDM di industri pasar modal syariah, OJK telah menyusun modul pasar modal syariah yang dapat digunakan sebagai acuan materi pembelajaran pasar modal syariah di Perguruan Tinggi.

Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berdampak positif pada perkembangan industri pasar modal syariah, khususnya meningkatnya tingkat literasi dan inklusi pasar modal syariah. Semoga pasar modal syariah dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, berkeadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Direktur Pasar Modal Syariah

Fadilah Kartikasasi





## Kiprah Keuangan Syariah Indonesia di Pasar Global

2019

3.0%

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

2019

5.0%

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Tahun 2019 merupakan tahun penuh tantangan baik bagi perekonomian domestik maupun global. Cukup banyak faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian global pada tahun 2019, diantaranya isu brexit, proteksionisme dalam perdagangan global khususnya yang terjadi antara Amerika Serikat dan China.

*International Monetary Fund (IMF)* dalam laporannya bertajuk *World Economic Outlook* yang diterbitkan bulan Oktober 2019 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,0% untuk 2019. Angka tersebut merupakan tingkat perkiraan terendah sejak tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat menjadi 3,4 persen pada tahun 2020. Angka tersebut merupakan cerminan utama dari proyeksi pertumbuhan ekonomi pada negara-negara berkembang di Amerika Latin, Timur Tengah dan negara maju dan berkembang di benua Eropa yang berada dibawah tekanan.

Selain itu IMF dalam publikasi yang sama juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 berada pada level 5%. Perkiraan pertumbuhan tersebut, berada di posisi ketiga di bawah Vietnam yang diproyeksi tumbuh 6,5% dan Filipina yang tumbuh 5,7% di tahun ini.

Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1 persen pada 2019, kemudian naik menjadi 5,2% pada tahun 2020. Proyeksi ini didukung oleh konsumsi masyarakat, yang diperkirakan akan terus meningkat karena inflasi tetap rendah dan pasar tenaga kerja yang kuat.

Di tengah kondisi perekonomian global yang melambat dan proyeksi pertumbuhan perekonomian yang cukup rendah pada tahun 2019, industri keuangan syariah secara umum maupun pasar modal syariah di Indonesia meraih pencapaian yang cukup menggembirakan.



2019

81.93

Indonesia Latest IFCI Score

### Islamic Finance Country Index (IFCI)

Dalam sejarahnya, Islamic Finance Country Index (IFCI) bertujuan untuk memperoleh gambaran atas pertumbuhan industri keuangan Islam serta memberikan penilaian secara langsung atas kondisi keuangan Islam pada masing-masing negara. Dengan data yang telah dimiliki selama sembilan tahun, IFCI telah dapat digunakan untuk menilai sebuah negara tidak hanya pada satu tahun tertentu, namun juga tahun-tahun sebelumnya.

IFCI merupakan indeks tertua dalam menghitung peringkat berbagai negara sehubungan dengan kondisi perbankan dan keuangan Islam dan peran kepemimpinan mereka dalam industri pada tingkat nasional.

Pada tahun 2019, berdasarkan indeks, Indonesia memperoleh skor sebesar 81,93 pada indeks tersebut dan menempati posisi pertama dari 48 negara yang masuk dalam indeks tersebut. Indonesia dapat membuktikan telah menjadi menjadi pemain utama dalam industri keuangan syariah global.

### LATEST IFCI SCORES & RANKS

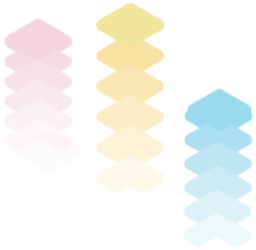
COUNTRIES	2019 SCORE	2018 SCORE	CHANGE IN SCORE	2019 RANK	2018 RANK	CHANGES IN RANK
INDONESIA	81.93	24.13	+57.80	1	6	+5
MALAYSIA	81.05	81.01	+0.04	2	1	-1
IRAN	79.03	79.01	+0.02	3	2	-1
SAUDI ARABIA	60.65	66.66	-6.01	4	3	-1
SUDAN	55.71	17.09	+38.62	5	11	+6
BRUNEI DARUSSALAM	49.99	10.11	+39.88	6	14	+8
UNITED ARAB EMIRATES	45.31	39.78	+5.53	7	4	-3
BANGLADESH	43.01	17.78	+25.23	8	10	+2

Sumber : Global Islamic Finance Report 2019



Menurut Global Islamic Finance Report 2019, faktor-faktor yang menjadi penentu Indonesia mencapai peringkat tertinggi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari level tertinggi yaitu Presiden Joko Widodo yang menjadi ketua Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dalam rangka pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.
2. Fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar dalam lingkup Organisasi Konferensi Islam (OKI), baik dari sisi populasi maupun Gross Domestic Product (GDP) serta dukungan tertinggi negara.
3. Perkembangan regulasi terkait keuangan syariah di Indonesia mengambil peranan penting dalam menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peringkat keuangan syariah tertinggi. Dalam hal ini peran Otoritas Jasa Keuangan cukup signifikan.
4. Ekosistem untuk keuangan syariah di Indonesia telah meningkat secara signifikan. Pariwisata halal, pengumpulan dan distribusi zakat, sukuk wakaf telah didukung oleh regulasi terkait.
5. Sektor swasta juga memainkan peran yang sangat penting dalam mempromosikan keuangan syariah.



2019

4  
Peringkat Indonesia Berdasarkan IFDI

### Islamic Finance Development Indicator (IFDI)

Pada tahun 2019, Islamic Corporation Development (ICD) dan penyedia data pasar keuangan Refinitiv mempublikasikan indikator Islamic Finance Development Indicator (IFDI). IFDI memberikan peringkat dan profil untuk pasar keuangan Islam pada negara-negara di seluruh dunia.

Indikator ini menggambarkan faktor-faktor penting yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) bidang sebagai indikator utama, yaitu Pengembangan, Pengetahuan, Tata Kelola, Corporate Social Responsibility. Berdasarkan publikasi tersebut, Indonesia menempati posisi ke 4 peringkat IFDI. posisi tersebut melonjak enam langkah ke urutan ke-4 dari posisi ke-10.

### Top IFDI Markets 2019

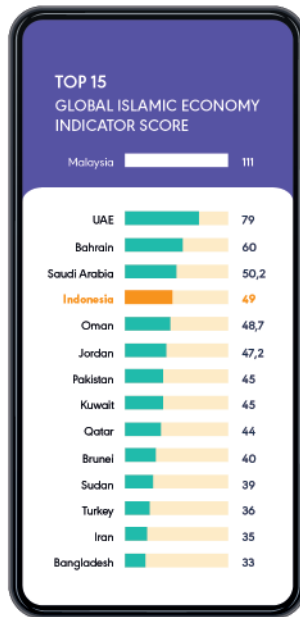
Country	IFDI Value	IFDI 2019	Quantitative Development	Knowledge	Governance	CSR	Awareness
Malaysia	115	1	1	1	1	11	1
Bahrain	71	2	4	6	2	7	3
United Arab Emirates	70	3	6	5	3	6	2
<b>Indonesia</b>	<b>68</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
Saudi Arabia	60	5	5	8	20	2	7
Jordan	57	6	17	4	13	1	13
Pakistan	56	7	13	3	7	17	4
Kuwait	54	8	2	22	8	4	9
Oman	52	9	12	11	4	3	8
Brunei Darussalam	45	10	19	7	5	24	5
Qatar	44	11	11	17	15	5	6
Maldives	37	12	10	18	6	10	14
Bangladesh	33	13	7	19	12	12	24
Nigeria	32	14	25	12	10	9	41
Sri Lanka	30	15	14	13	16	8	23

Sumber : Islamic Finance Development Report 2019



## State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020

Pada tahun 2019, State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020 mempublikasikan peringkat Global Islamic Economy Indicator Score. Peringkat tersebut didasari dari indikator yang telah berumur 6 tahun dengan cara mengevaluasi ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi Islam dalam sebuah negara. Lebih jauh Indikator tersebut mengukur kekuatan ekonomi Islam pada 73 negara. Faktor yang dinilai antara lain supply dan demand, tata kelola, dan faktor-faktor lainnya. Faktor finansial dan makanan halal menjadi nilai tertinggi dalam penilaian indikator tersebut. Berdasarkan peringkat tersebut, secara total Indonesia menempati posisi kelima.



Sumber: State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020



## Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC)

Berdasarkan data Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC), Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan nilai outstanding global sukuk terbesar di dunia. Porsi sebesar 7,0% terhadap seluruh nilai sukuk outstanding secara global. Malaysia menempati posisi pertama dan diikuti oleh Arab Saudi dan Arab Emirat pada posisi kedua dan ketiga.



Global Sukuk Outstanding by Domicile as at end 2019

Others 11,1% | Qatar 4,2% | Indonesia 7,0%  
UAE 8,1% | Saudi Arabia 21,7% | Malaysia 47,9%

Sumber : MIFC estimates

Sedangkan dari sisi reksa dana syariah, berdasarkan data MIFC per akhir tahun 2019, secara global Indonesia menempatkan pada posisi kelima negara dengan dana kelolaan reksa dana syariah terbesar di dunia.



Global Islamic Funds AuM by Domicile as at end 2019

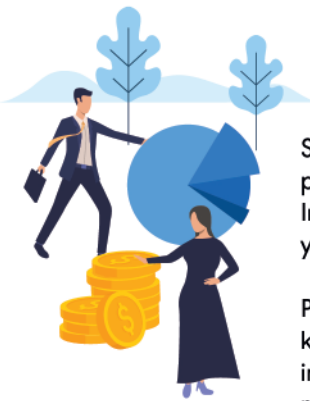
Others 11% | Indonesia 3% | Luxembourg 5%  
Jersey 13% | Malaysia 34% | Saudi Arabia 34%

Sumber : MIFC estimates



### The Best Islamic Capital Market Award 2019

Sebagaimana disampaikan dalam press releasenya, pada tahun 2019, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperoleh penghargaan internasional Global Islamic Finance Awards (GIFA) 2019 untuk kategori The Best Islamic Capital Market Award 2019. Lebih lanjut, penghargaan yang merupakan capaian tertinggi dalam industri pasar modal syariah global dan menjadi bentuk pengakuan industri keuangan syariah internasional terhadap pasar modal syariah Indonesia sebagai pasar modal syariah yang terbaik di dunia.



### Indonesia Sebagai Negara Pertama Penerbit Sovereign Green Sukuk Retail

Setelah di tahun sebelumnya Indonesia mencatatkan sebagai negara pertama di dunia sebagai penerbit *Sovereign Green Sukuk*, pada tahun 2019 Indonesia kembali mencatatkan namanya sebagai negara pertama di dunia yang menerbitkan *sovereign green sukuk* retail.

Pada tanggal 1-21 November 2019, Pemerintah telah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi di Sukuk Tabungan seri ST006 dengan imbalan sebesar 6,75% p.a (*floating with floor*). ST006 berhasil mengumpulkan total nominal pembelian sebesar Rp1,46 triliun dengan jumlah investor sebanyak 7.735 orang yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Sukuk Tabungan merupakan produk investasi syariah terkini yang ditawarkan oleh pemerintah, memiliki jangka waktu dua tahun, tidak dapat diperjualbelikan, dan telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko - Kementerian Keuangan RI, melalui penerbitan Green Sukuk Ritel seri ST006, pemerintah berencana melakukan pembiayaan atas proyek ramah lingkungan.

Hal tersebut diharapkan dapat memitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi atas perubahan iklim yang telah terjadi. Tujuan penerbitan ST006 secara online adalah untuk mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel, menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat, mendukung terwujudnya keuangan inklusif, serta memenuhi sebagian pembiayaan APBN 2019 sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional khususnya untuk green asset.





## Program Unggulan Pengembangan Pasar Modal Syariah 2019

Hingga 2019 perkembangan pasar modal syariah terus bertumbuh dan berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi nasional. Pertumbuhan pasar modal syariah harus terus didorong, sehingga geliat pasar modal syariah semakin dirasakan. Oleh karena itu, OJK dalam hal ini Direktorat Pasar Modal Syariah, bersama seluruh pemangku kepentingan, terus melakukan langkah-langkah pengembangan pasar modal syariah. Beberapa langkah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019 antara lain berfokus pada literasi digital, edukasi, dan pengembangan produk maupun infrastruktur pasar modal syariah. Berikut pemaparan mengenai langkah unggulan pengembangan pasar modal syariah 2019.



### 1. LITERASI DIGITAL PASAR MODAL SYARIAH

Andry Wicaksono



Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah

Nadhifa Alim Hapsari



Staf Subbagian Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah

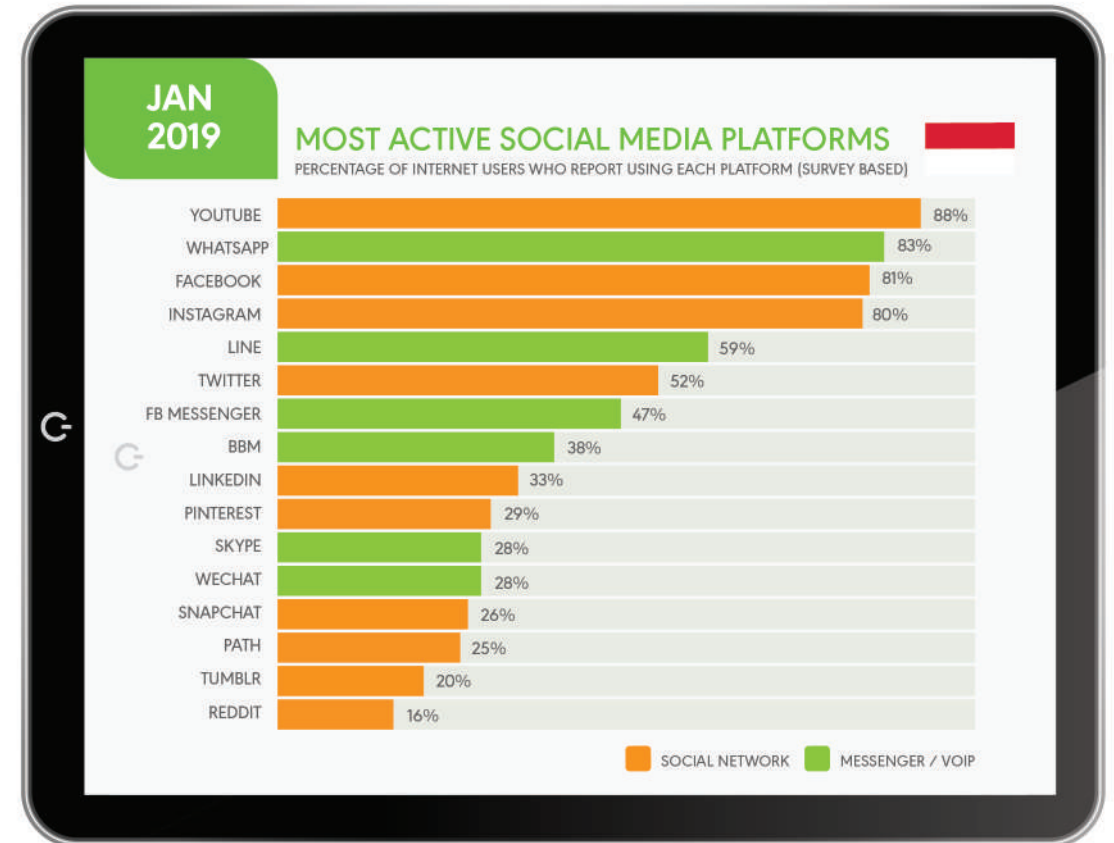
Arief Hari Wibowo



Staf Subbagian Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah



Di tahun 2019, Direktorat Pasar Modal Syariah melakukan literasi secara digital melalui *website* dan sosial media. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar literasi pasar modal syariah dapat menjangkau masyarakat lebih luas tanpa batas. Literasi digital ini dilakukan dengan merujuk pada data Digital Indonesia yang dirilis oleh Hootsuite di tahun 2019, bahwa total jumlah pengguna aktif sosial media mencapai 150 juta *user*. Dari sekian banyaknya platform sosial media, Youtube menjadi platform sosial media dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia per Januari 2019.



Adapun sosial media yang telah digunakan dalam melakukan literasi pasar modal syariah antara lain Youtube, Instagram, dan Facebook. Dari semua platform yang digunakan menunjukkan peningkatan *subscriber* maupun *follower* yang cukup menggembirakan.



## Youtube Pasar Modal syariah

Channel Youtube Pasar Modal Syariah dibuat sejak bulan Desember 2018. Hingga akhir Desember 2019, jumlah *subscriber* Youtube Pasar Modal Syariah mencapai 1.360 *subscriber* atau meningkat 783% sejak awal tahun. Konten yang disajikan beragam, meliputi pengenalan konsep pasar modal di Indonesia, fitur dan karakteristik produk pasar modal syariah, aspek syariah pasar modal dan topik terkait lainnya. Sepanjang tahun 2019 terdapat 47 video yang telah dipublikasikan. Beberapa video yang paling banyak mendapatkan views adalah:

1. "Mari Mengetahui Perbedaan Sukuk dan Obligasi" (4,2k views)
2. "Cara Mudah Investasi Saham Syariah" (3,1k views)
3. "Memulai Investasi di Saham Syariah Bareng Mang Amsi" (2,7k views)
4. "Sukses Investasi Syariah untuk Para Muslim" (1,4k views)
5. "Saham Syariah, Bersama Ryan Filbert" (1,2k views)



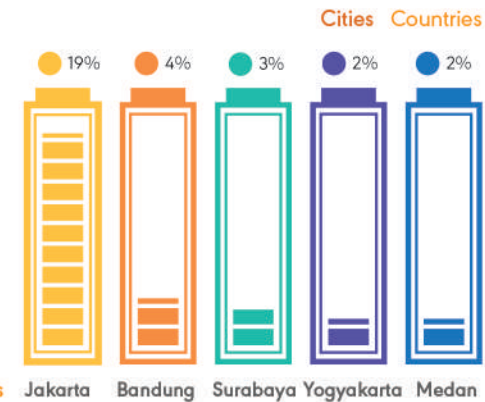
Data tersebut menunjukkan bahwa video edukasi dengan topik fitur produk investasi syariah cenderung diminati oleh *subscriber*. Untuk selanjutnya, pengelolaan *channel* ini akan dilakukan dengan cara memperbanyak video dengan tema serupa dan dipromosikan melalui akun sosial media lainnya.



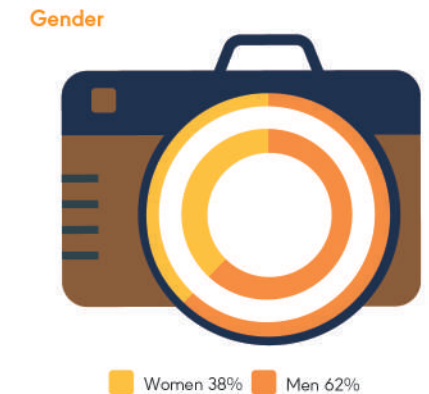
## Instagram @pasar\_modal\_syariah

Instagram @pasar\_modal\_syariah dibuat sejak Desember 2016. Hingga akhir 2019, *follower* akun ini mencapai 56,6k *follower*, yaitu meningkat 62% dari tahun sebelumnya atau mengalami peningkatan rata-rata 1.800 *follower*/bulan. Per 2019, *engagement rate* akun ini mencapai 0,84%. Sebagai perbandingan, *engagement rate influencer* dengan jumlah *follower* terbanyak rata-rata mencapai 3,99%. Hal ini menunjukkan konten yang disajikan secara keseluruhan memiliki *impact* yang cukup besar bagi *follower*.

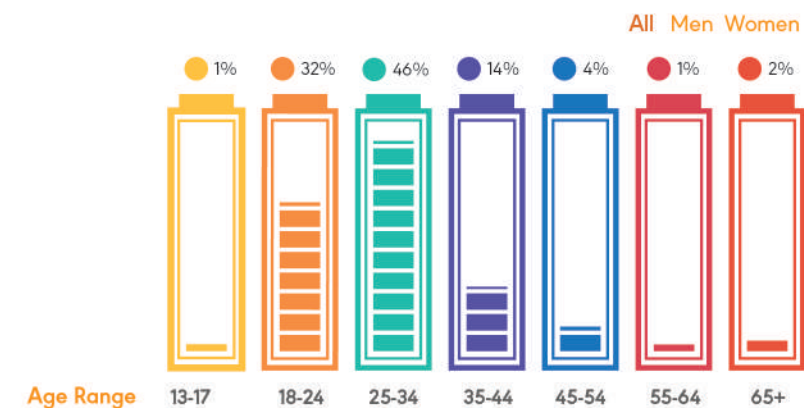
### Jumlah Follower Berdasarkan Wilayah



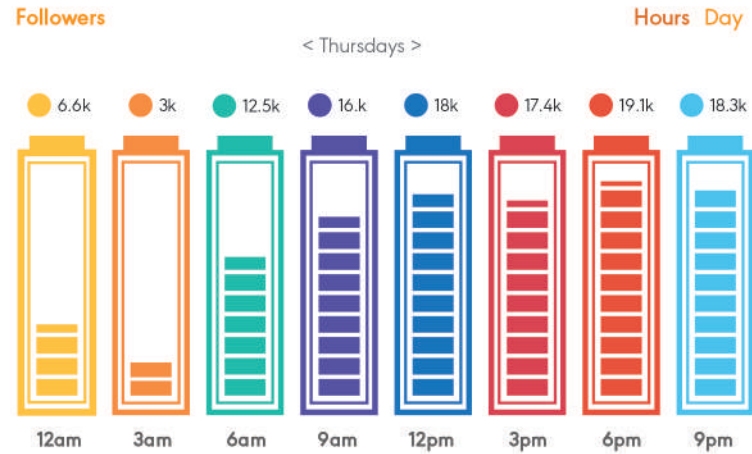
### Jumlah Follower Berdasarkan Jenis Kelamin



### Jumlah Follower Berdasarkan Rentang Usia



### Jumlah Follower Berdasarkan Waktu Aktif



Instagram  
@pasar\_modal\_syariah



Berdasarkan *insight*, *follower* @pasar\_modal\_syariah didominasi pria (62%) dengan range usia produktif yaitu 25-34 tahun. Domisili terbanyak adalah Jakarta, disusul dengan kota Bandung, Surabaya, Yogyakarta dan Medan. Secara rata-rata harian, *follower* lebih aktif mengakses konten pada hari Kamis setelah jam kerja. Data inilah yang menjadi referensi Direktorat Pasar Modal Syariah untuk mencari ide dan menyusun strategi peningkatan edukasi secara digital.

Sepanjang tahun 2019, telah terdapat 236 konten yang terdiri dari 778 *stories* dan 236 *feed*. Dari keseluruhan *stories*, *reach* terbesar ada pada konten "Daftar Efek Syariah Periode II 2019" dengan jumlah 3.619 *accounts*. Adapun *feed* dengan *reach* dan *impressions* terbesar adalah konten "Cara Mendapatkan Passive Income" masing-masing 19.722 *accounts reach* dan 30.000 *accounts impressions*, 47% diantaranya adalah *instagram user* yang belum menjadi *follower* @pasar\_modal\_syariah. Berdasarkan data *analytics*, konten tersebut mendapat respon 749 *likes*, 19 *comments*, 80 *shares*, 371 *saved*, 198 *profile visits* dan 5 *website click*.

Beberapa *feed* lainnya yang memperoleh *reach* terbesar adalah:

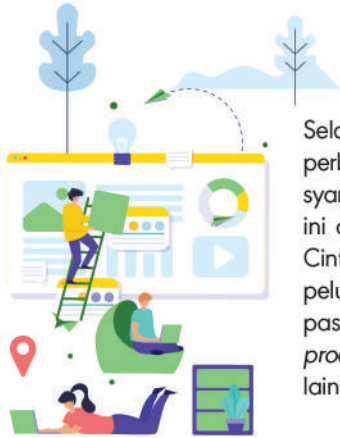
1. "Mau Belajar Saham, Kak @kaesangsp?" (17,6k *accounts*)
2. "Tips Memilih Portofolio Investasi untuk Masa Pensiun" (17,3k *accounts*)
3. "Filosofi Ketupat" (15,6k *accounts*)
4. "Which One are You? Trader / Investor" (14,6k *accounts*)
5. "Zakat Saham" (14,5k *accounts*)



### Facebook Pasar Modal Syariah

Akun Facebook Pasar Modal Syariah merupakan media sosial yang pertama kali digunakan untuk mensosialisasikan pasar modal syariah secara online. Sejak dibuat pada bulan November 2015, fanpage Pasar Modal Syariah ini telah diikuti oleh lebih dari 36.000 *accounts*. Engagement rate akun Pasar Modal Syariah mencapai 505% sepanjang tahun 2019, menunjukkan bahwa masih banyak pengguna akun Facebook berasal dari kalangan milenial. Pengelolaan akun Facebook saat ini lebih mudah dikarenakan terhubung dengan platform Instagram.



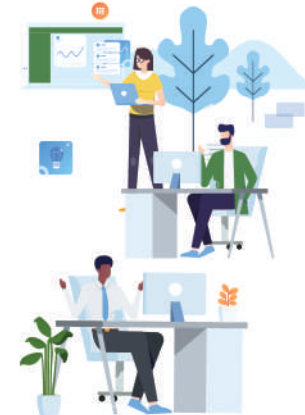
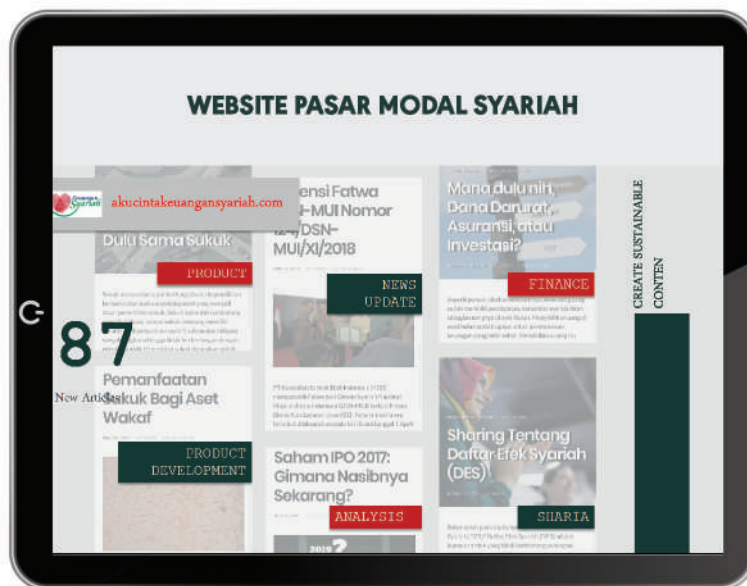


## Website Aku Cinta Keuangan Syariah

Selain *social media*, Direktorat Pasar Modal Syariah juga bersinergi dengan sektor perbankan syariah dan non-bank syariah untuk melakukan literasi keuangan syariah melalui pengelolaan website [www.akucintakeuangansyariah.com](http://www.akucintakeuangansyariah.com). Website ini diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2015 bersamaan dengan Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak peluncurannya, hingga saat ini terdapat 227 *subscriber*. Khusus terkait dengan pasar modal syariah, sepanjang tahun 2019, terdapat 87 artikel baru dengan topik *product development*, *news update*, *data analysis* dan beberapa topik terkait lainnya. Adapun artikel yang mendapatkan views terbanyak antara lain:

1. "Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia" (94 views)
2. "Investasi Akhirat dengan Wakaf Saham" (87 views)
3. "Investasi dan Fenomena Halal Lifestyle di Indonesia" (83 views)
4. "Tak Kenal maka Tak Invest: Kenalan dulu sama Suku" (75 views)
5. "Cara Jadi Investor Pasar Modal Syariah: Yang Harus Dilakukan dan Persyaratan" (72 views)

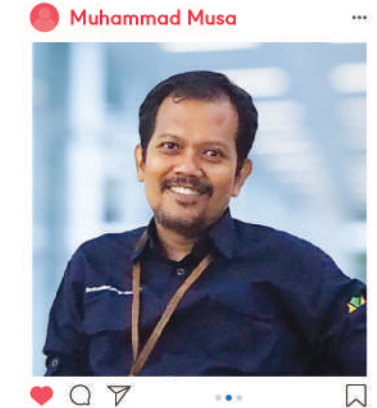
Dengan literasi digital ini diharapkan tingkat literasi masyarakat mengenai pasar modal syariah dapat terus meningkat. Peningkatan literasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan inklusi pasar modal syariah yang selanjutnya dapat berkontribusi pada pengembangan pasar modal syariah Indonesia.



## 2. PENYUSUNAN MODUL PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI



Wuri Ekawati Putri  
Kepala Subbagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah Bidang Emiten dan Perusahaan Publik

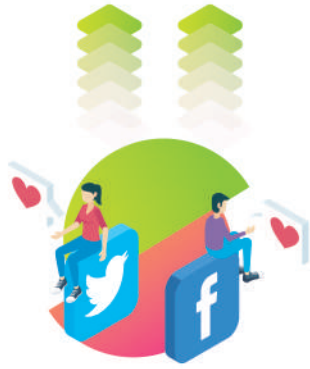


Muhammad Musa  
Staf Subbagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah Bidang Emiten dan Perusahaan Publik

Pertumbuhan industri pasar modal syariah perlu diimbangi dengan ketersediaan SDM yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki. Hingga saat ini, perguruan tinggi masih dipercaya sebagai lembaga pendidikan utama dalam membentuk para profesional yang handal untuk mendukung tumbuh kembang pasar modal syariah. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah memasukkan materi pasar modal syariah ke dalam kurikulum pendidikannya, baik dalam bentuk mata kuliah tersendiri maupun menjadi bagian dalam mata kuliah lain. Namun demikian, masih diperlukan standarisasi atas materi pasar modal syariah tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri pasar modal syariah di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Pasar Modal Syariah - Otoritas Jasa Keuangan, bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan penyusunan modul pasar modal syariah. Pemilihan perguruan tinggi yang ditawarkan untuk bekerjasama dalam penyusunan modul tersebut didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: memiliki/mengajarkan materi pasar modal syariah, program studi memiliki akreditasi minimal B, dan memiliki tenaga pengajar yang kompeten dalam mengajarkan materi pasar modal syariah. Berdasarkan hasil identifikasi atas beberapa kriteria tersebut, terpilih enam perguruan tinggi yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul pasar modal syariah, yaitu: (1) Universitas Indonesia; (2) Universitas Airlangga; (3) Institut Pertanian Bogor; (4) Universitas Padjadjaran; (5) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; dan (6) STEI TAZKIA.





Penyusunan modul pasar modal syariah ini telah melalui proses yang cukup panjang. Proses tersebut diawali dengan penyusunan kajian pada tahun 2016 untuk mengetahui urgensi penyusunan modul pasar modal syariah dan dilanjutkan dengan survei pemetaan kompetensi untuk mengetahui standar kompetensi yang dibutuhkan bagi SDM syariah di pasar modal pada tahun 2017. Proses tersebut berlanjut di tahun 2018 dengan penyusunan modul pasar modal syariah dan disempurnakan pada tahun 2019. Modul pasar modal syariah ini diharapkan dapat menjadi literatur standar dalam pengajaran pasar modal syariah di perguruan tinggi, serta dapat mewujudkan *link and match* antara materi pengajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan di industri pasar modal syariah.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan *pilot project* kerja sama dengan perguruan tinggi yang menjadi anggota tim penyusun modul untuk penggunaan modul pasar modal syariah sebagai literatur standar pengajaran. Pelaksanaan *pilot project* tersebut bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan modul pasar modal syariah di perguruan tinggi dan mengetahui dampak pelaksanaan program dimaksud sebelum disebarluaskan ke seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Penggunaan modul pasar modal syariah sebagai literatur standar pengajaran di perguruan tinggi juga telah didukung dengan adanya hak otonomi bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum pembelajaran sesuai kebutuhan. Hal ini sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi beserta peraturan pelaksanaannya. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi. Otonomi dimaksud, antara lain otonomi dalam hal menentukan kurikulum program studi. Modul pasar modal syariah dapat dikategorikan sebagai bagian dari kurikulum karena dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

Ke depan, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan dengan keenam perguruan tinggi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan *pilot project* penggunaan modul pasar modal syariah di perguruan tinggi oleh para dosen dan mahasiswa. Modul ini juga perlu disusun dalam bentuk *e-book* untuk menyesuaikan target pengguna modul (mahasiswa) yang tergolong generasi Z dan milenial. OJK juga akan memperluas penggunaan modul pasar modal syariah ke perguruan tinggi lainnya di luar enam perguruan tinggi di atas melalui koordinasi/kerja sama, antara lain dengan Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (AFEBIS), Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI), dan Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah (ADESY). Langkah ini diharapkan dapat mendorong pasar modal syariah berkembang semakin pesat karena didukung SDM yang memiliki pemahaman yang dalam mengenai pasar modal syariah.



<p><b>1</b> Pengenalan Pasar Modal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Pasar Modal</li> <li>2. Fungsi dan Peran Pasar Modal</li> <li>3. Sejarah Pasar Modal</li> <li>4. OJK sebagai Regulator Sektor Jasa Keuangan</li> <li>5. <i>Self-Regulatory Organization</i></li> <li>6. Pelaku Industri Pasar Modal</li> </ol>	<p><b>2</b> Pasar Modal Syariah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Pasar Modal Syariah</li> <li>2. Sejarah dan Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah</li> <li>3. Prinsip Dasar Fikih Muamalah</li> <li>4. Fatwa terkait Pasar Modal Syariah</li> <li>5. Konsep Akad dan Jenisnya</li> <li>6. Kerangka Regulasi Pasar Modal Syariah</li> <li>7. Pelaku Syariah di Pasar Modal</li> </ol>	<p><b>3</b> Saham Syariah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Saham Syariah</li> <li>2. Penyeleksian Saham Syariah</li> <li>3. Indeks Saham Syariah</li> <li>4. Penawaran Umum Saham Syariah</li> <li>5. Mekanisme Transaksi Saham</li> <li>6. Penilaian Saham</li> <li>7. Inovasi Produk</li> <li>8. Studi Kasus</li> </ol>
<p><b>4</b> Sukuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Sukuk</li> <li>2. Jenis Sukuk</li> <li>3. Penerbitan Sukuk</li> <li>4. Perkembangan Sukuk</li> <li>5. Isu-Isu Terkini</li> <li>6. Studi Kasus</li> </ol>	<p><b>5</b> Reksa Dana Syariah dan Produk Investasi Syariah Lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Reksa Dana Syariah</li> <li>2. Jenis Reksa Dana Syariah</li> <li>3. Pembentukan Reksa Dana Syariah</li> <li>4. Inovasi Produk</li> <li>5. Studi Kasus</li> </ol>	<p><b>6</b> Pengenalan Investasi Syariah di Pasar Modal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Keuangan Syariah</li> <li>2. Manajemen Investasi</li> <li>3. Manajemen Risiko</li> <li>4. Manajemen Portofolio</li> <li>5. Hipotesis Pasar Efisien</li> <li>6. Waspada Investasi Ilegal</li> </ol>





### 3. PEMANFAATAN SUKUK WAKAF DAN SUKUK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDANAAN PILIHAN

Perkembangan Sukuk di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Secara akumulasi, sukuk korporasi yang telah diterbitkan di Indonesia sejak tahun 2000 hingga akhir 2019 mencapai 232 seri dengan nilai nominal Rp47,88 triliun. Dengan memperhatikan potensi penerbitan sukuk di Indonesia, potensi wakaf yang terus berkembang, dan kebutuhan dana untuk pembangunan daerah, OJK mendorong penerbitan sukuk berupa sukuk wakaf dan sukuk daerah. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019 ini adalah sebagai berikut:



#### Pendampingan terhadap Pihak yang Berminat Menerbitkan Sukuk Wakaf



Indriani Widyastuti

Kepala Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Emiten dan Perusahaan Publik



Elleriz Aisha Khasandy

Staf Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Emiten dan Perusahaan Publik

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dunia sudah selayaknya mengembalikan peran wakaf sebagai pilar ekonomi umat. Karakteristik umum dari instrumen wakaf adalah adanya konsep pokok (*corpus*) yang ditahan dan dijaga kelestariannya serta hasil atau manfaat dari pengelolaan aset tersebut yang diserahkan kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*). Aktivitas tersebut identik dengan aktivitas investasi, sehingga sejumlah ahli ekonomi syariah meyakini bahwa wakaf sejatinya berupa pemberdayaan aset produktif.

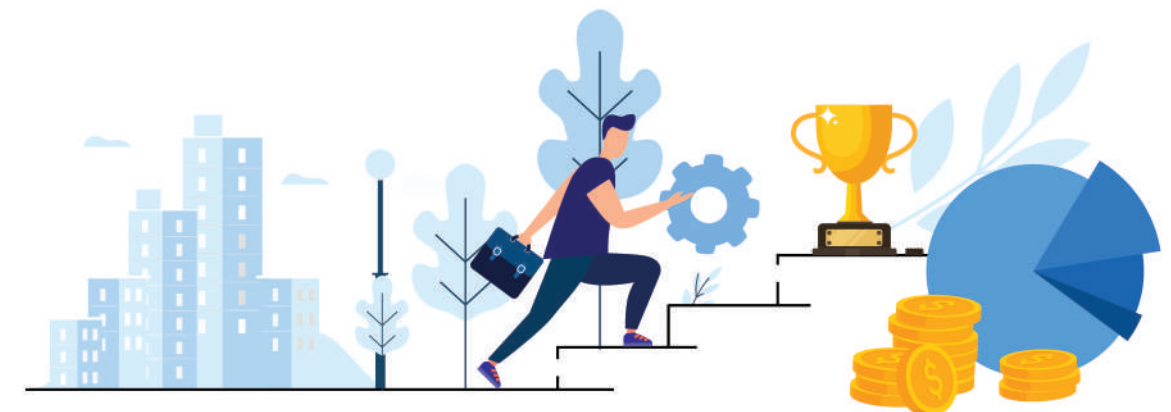
Di beberapa negara, pengelolaan aset wakaf sudah lebih maju dan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan kepada umat. Salah satu contohnya adalah pembangunan Zamzam Tower di atas tanah wakaf dengan menggunakan sukuk Al-Intifa', yang berlokasi di Mekah, Arab Saudi.

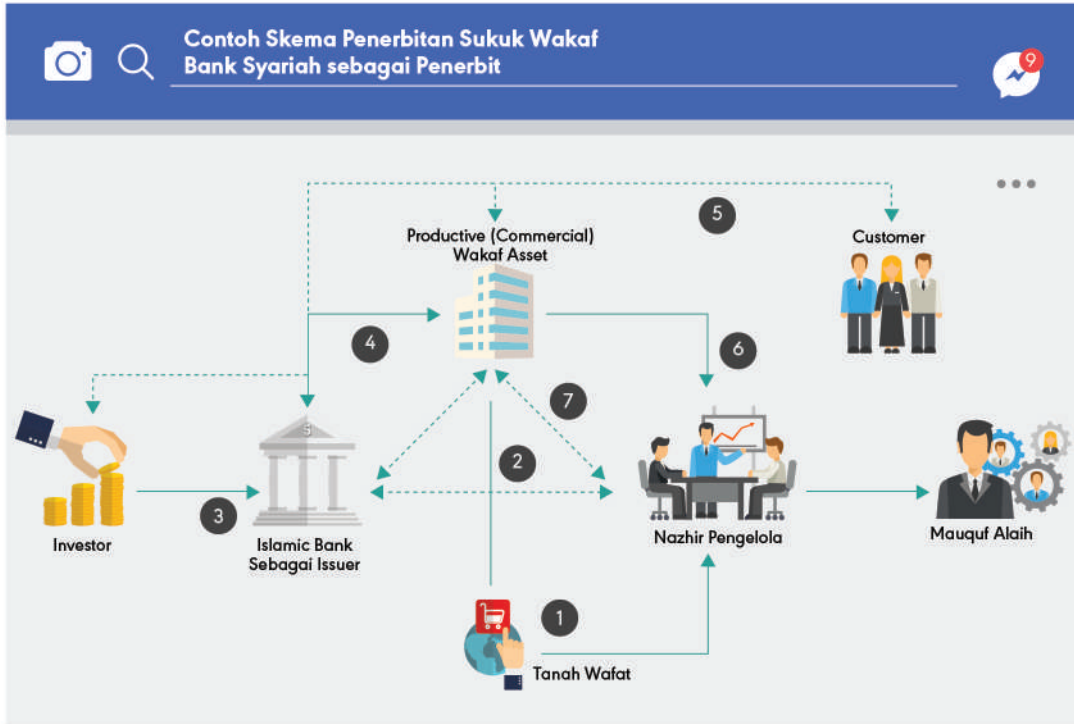
Program ini merupakan lanjutan dari penyusunan kajian produk investasi berbasis wakaf di tahun 2018. Untuk tahun 2019, program lanjutan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi dan berminat dalam menerbitkan sukuk wakaf, serta melakukan pendampingan kepada pihak-pihak tersebut.

Untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi dan mengetahui struktur penerbitan sukuk wakaf yang memungkinkan, telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak-pihak yang terkait, seperti pengelola wakaf (*nazhir*), universitas yang memiliki tanah wakaf, bank syariah, dan perusahaan pembiayaan syariah. Berdasarkan hasil FGD tersebut, terdapat 2 (dua) macam struktur penerbitan sukuk wakaf yang dapat diterapkan di Indonesia, yaitu:

#### 1. Penerbitan sukuk untuk pengembangan aset properti di atas tanah wakaf

Dalam penerbitan sukuk ini, yang dapat menjadi pihak penerbit sukuk adalah perusahaan kontraktor (*developer*) atau bank syariah. Mengingat perusahaan kontraktor belum ada yang berminat sebagai penerbit sukuk wakaf, maka bank syariah mempunyai preferensi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena bank syariah memiliki sumber dana yang lebih mumpuni (*cashflow ability*), memiliki *customer based* yang besar sebagai potensial investor sukuk, dan memiliki *governance* yang baik untuk akses ke pasar modal.





OJK and 345 others

12 comments

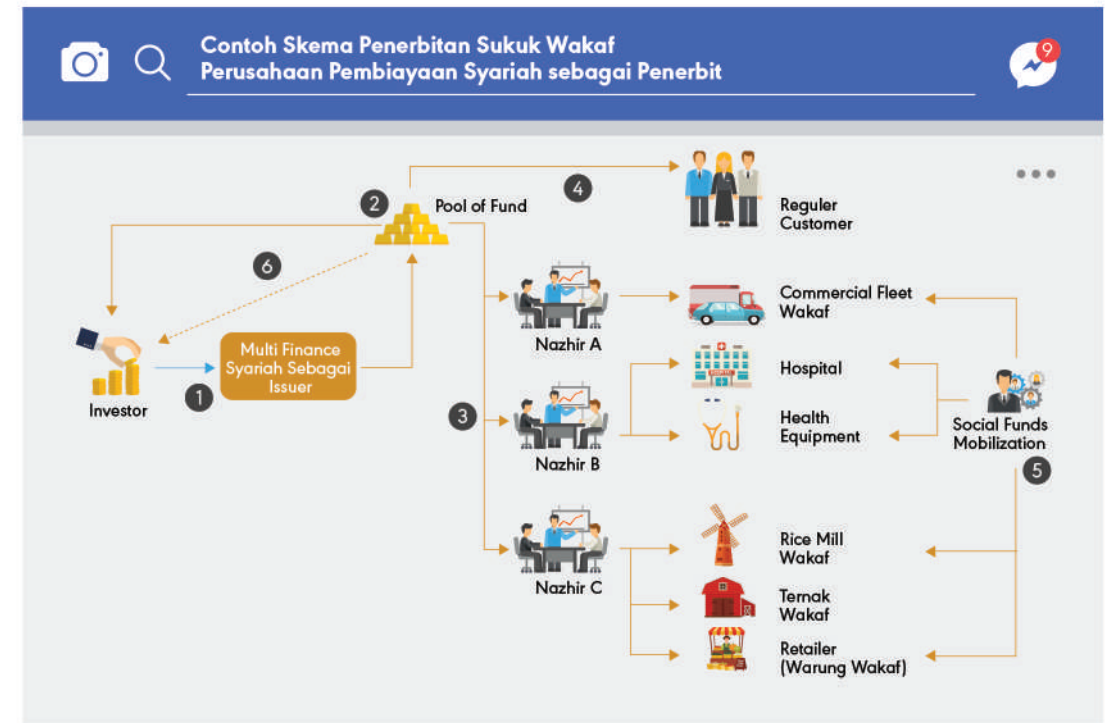
Penjelasan Gambar:

1. Nazhir memiliki mandat untuk mengelola sebidang tanah wakaf.
2. Nazhir bersama Bank Syariah melakukan perjanjian dengan akad Al Hukr, yakni pihak investor memiliki hak penuh pengelolaan tanah wakaf dalam jangka panjang (*unidentified time of lease*).
3. Bank Syariah menerbitkan Sukuk.
4. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk digunakan untuk membangun aset komersial di atas tanah wakaf.
5. Bank mengoperasionalkan aset dan mendapatkan sumber pendapatan yang digunakan untuk (a) mencicil biaya pembangunan dan akumulasi keuntungan (b) membayar kupon Sukuk, dan (c) membayar sewa tanah.
6. Atas pendapatan sewa yang diterima, nazhir meneruskannya kepada penerima manfaat (*mauquf alaih*).
7. Setelah akad Al Hukr berakhir, bank menyerahkan bangunan kepada nazhir sebagai hibah. Nazhir mendapatkan seluruh kepemilikan dan nilai kemanfaatan dari aset komersial tersebut.



## 2. Penerbitan sukuk untuk sumber pembiayaan pengembangan aset wakaf dalam bentuk modal kerja atau investasi

Dalam penerbitan sukuk ini, yang dapat menjadi pihak penerbit sukuk adalah lembaga keuangan syariah, seperti perusahaan pembiayaan syariah, bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah (*Baitul Maal wa Tamwil/BMT*), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Saat ini telah ada perusahaan pembiayaan syariah yang berminat untuk menerbitkan sukuk wakaf dengan skema ini, yang hasil penerbitan sukuknya akan digunakan sebagai sumber dana (*pool of fund*) untuk dialokasikan ke beberapa proyek pengembangan aset wakaf yang dikelola oleh beberapa nazhir.



OJK and 345 others

12 comments

Penjelasan Gambar:

1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menerbitkan sukuk, dengan *underlying* penerbitan adalah tagihan kepada nazhir.
2. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk diperlakukan sebagaimana kumpulan dana (*pool of fund*) khusus yang akan dioperasionalkan dalam bentuk pembiayaan.



3. Dana dialokasikan ke sejumlah proyek terkait wakaf yang dikelola oleh para nazhir.
4. Apabila dalam perkembangannya masih terdapat sisa dana di dalam pool of fund yang belum dioperasionalkan LKS akan mengalokasikannya kepada *regular customer*. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan
  - a. LKS memiliki kewajiban membayarkan kupon kepada investor dan
  - b. LKS merupakan korporasi wakaf (saham perseroan berasal dari wakaf).
5. Selain dari sumber operasionalisasi aset wakaf yang dibiayai, LKS juga berhak mendapatkan sumber pembayaran lain dari program *rising fund* yang dilakukan oleh nazhir, sekaligus menjadi *back up income* dari aset wakaf yang dibiayai.
6. Dari hasil cicilan pembayaran yang diterima oleh nazhir, LKS mengalokasikan untuk pembayaran bagi hasil (kupon) kepada investor serta membayar seluruh kewajiban kepada investor saat sukuk jatuh tempo.

Pada dasarnya sukuk wakaf adalah sukuk komersial seperti sukuk lain pada umumnya, namun adanya penekanan hanya khusus digunakan untuk pengembangan aset wakaf tentunya membutuhkan strategi pemasaran yang berbeda. Selain itu pemahaman masyarakat tentang wakaf juga masih sangat terbatas. Namun demikian, di lain sisi, adanya *branding* "wakaf" juga berpotensi untuk dapat menysasar segmen baru yaitu segmen investor filantropi. Sukuk wakaf merupakan salah satu solusi dalam mengatasi besarnya aset wakaf yang *idle* dan terletak di lokasi strategis. Pada umumnya kendala ada pada kesulitan nazhir dalam memperoleh pendanaan dari bank mengingat aset wakaf tidak dapat dijadikan jaminan.

Dari kedua contoh skema sukuk wakaf di atas, OJK telah mengidentifikasi dan melakukan pendampingan terhadap pihak-pihak yang memiliki potensi untuk menerbitkan sukuk wakaf. Dalam waktu dekat diharapkan akan terbit sukuk wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas aset-aset wakaf yang dikelola oleh seluruh nazhir yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Semakin produktif aset wakaf, maka semakin besar manfaat aset wakaf bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, produk pasar modal syariah, khususnya sukuk akan meningkat.



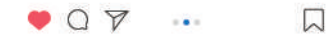
## Pemetaan Potensi Penerbitan Sukuk Daerah

Indriani Widyastuti



Kepala Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Emiten dan Perusahaan Publik

Erlisa Diah Pertiwi



Staf Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Emiten dan Perusahaan Publik

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Agar rencana pembangunan dapat optimal, dibutuhkan perumusan kerangka pendanaan yang antara lain mencakup sumber pendanaan dan arah pemanfaatan yang sesuai. Dalam hal proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sumber pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pinjaman daerah.

Berdasarkan jenisnya, pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berupa obligasi daerah atau sukuk daerah. Dalam hal ini masyarakat dapat terlibat langsung sebagai investor pada penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah. Praktik penerapan obligasi daerah dan sukuk daerah telah dilakukan oleh beberapa negara maju dan negara berkembang.

Untuk mengetahui daerah atau provinsi mana yang berpotensi dalam menerbitkan sukuk daerah perlu dilakukan pemetaan berdasarkan kriteria tertentu. Pemetaan ini merupakan tindak lanjut atas hasil kajian pengembangan sukuk daerah yang disusun tahun 2016. Pemetaan ini dilakukan dengan menganalisis daerah yang berpotensi dalam menerbitkan sukuk daerah dan menganalisis landasan hukum terkait penerbitan sukuk daerah.

Saat ini, penerbitan sukuk daerah masih memiliki kendala dari sisi payung hukum karena belum disebutkan secara tersirat dalam undang-undang yang ada. Melalui koordinasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemetaan ini menemukan beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dari sisi regulasi.

Selanjutnya, dilakukan pemetaan daerah yang berminat menerbitkan sukuk daerah melalui beberapa tahapan berikut:

- 1 Mengidentifikasi provinsi berdasarkan rata-rata realisasi APBD dan kapasitas fiskal, diperoleh 15 provinsi yang berpotensi dalam mengajukan pinjaman daerah.
- 2 Mengidentifikasi 15 provinsi di atas berdasarkan aspek pendukung lainnya, yaitu aspek ekonomi (produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, pendapatan per kapita), aspek sosiologis (rasio Gini, indeks pembangunan manusia), dan aspek demografis (jumlah penduduk bekerja, jumlah penduduk muslim, tingkat inklusi keuangan syariah). Hasil dari identifikasi tersebut, diperoleh 5 provinsi yang mayoritas memiliki nilai aspek tertinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Aceh.
- 3 Mengidentifikasi proyek-proyek utama potensial yang dimiliki oleh kelima provinsi tersebut berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing provinsi.

Berdasarkan hasil identifikasi sesuai tahapan di atas, disimpulkan bahwa provinsi Aceh sebagai daerah yang paling berpotensi dalam menerbitkan sukuk daerah dengan pertimbangan jumlah penduduk muslimnya mencapai 98% dan adanya kekhususan dari perekonomian di Aceh yang wajib berlandaskan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini juga sejalan dengan hasil pertemuan OJK dengan pemerintah Aceh dalam diskusi terkait penerbitan sukuk daerah. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Aceh menunjukkan minatnya untuk menerbitkan sukuk daerah. Untuk dapat membantu pemerintah Aceh dalam merealisasikan minat tersebut, perlu dilakukan tindak lanjut antara lain pembentukan tim teknis dari pemerintah Aceh dan rencana kegiatan serta *time schedule* yang jelas sampai dengan sukuk daerah Aceh siap diterbitkan.

Selanjutnya, mengingat sukuk daerah saat ini masih terkendala dari sisi landasan hukum, perlu dilakukan pula harmonisasi dan penyamaan persepsi atas landasan hukum sukuk daerah sampai dengan dikeluarkannya regulasi yang menyebutkan secara eksplisit sukuk daerah sebagai alternatif pinjaman daerah.

### 1 Step 1



OJK melakukan koordinasi bersama regulator terkait diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Telah dilakukan beberapa kali rapat bersama dengan regulator terkait tersebut, diantaranya pada tanggal 12 Agustus 2019 bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1B di Gedung Soemitro Djojohadikusumo.

### 2 Step 2



OJK melakukan pendekatan kepada Pemerintah Daerah yang menurut hasil analisa memiliki potensi untuk menerbitkan sukuk daerah. Pendekatan tersebut dilakukan kepada Pemerintah Aceh dimana Plt. Gubernur Aceh, Bapak Nova Iriansyah beserta pejabat Aceh untuk berdiskusi mengenai potensi Aceh untuk menerbitkan sukuk daerah. Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2019 di Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta Pusat. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan pejabat OJK.

### 3 Step 3



OJK memberikan pendampingan kepada Pemerintah Aceh sebagai tindak lanjut surat Plt. Gubernur Aceh yang menyatakan minat untuk menerbitkan Sukuk Daerah kepada Menteri Keuangan. Pendampingan tersebut diwujudkan dalam bentuk *coaching clinic* yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2019 dan dihadiri oleh pejabat pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh.

# Program Pengembangan Pasar Modal Syariah 2019



## Program Pengembangan Pasar Modal Syariah 2019



Selain melakukan program unggulan dalam pengembangan pasar modal syariah, OJK juga melakukan beberapa program pengembangan yang meliputi penguatan kebijakan, pengembangan produk pasar modal syariah, pengembangan infrastruktur, melakukan sosialisasi dan penyuluhan, serta melakukan berbagai program pengembangan melalui sinergi dengan seluruh *stakeholder* pasar modal syariah. Adapun program pengembangan yang dilakukan sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### Penguatan Kebijakan

Dalam rangka melakukan penguatan kebijakan di bidang pasar modal syariah, OJK telah melakukan pembaruan beberapa peraturan pasar modal syariah. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang diterapkan sejalan dengan perkembangan industri. Adapun peraturan yang direvisi adalah peraturan terkait reksa dana syariah dan ahli syariah pasar modal. Dari kedua peraturan tersebut, di tahun 2019, satu peraturan telah terbit, yaitu peraturan terkait reksa dana syariah, dan satu peraturan dalam tahap penyusunan naskah akademis yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses *rule making rule* (RMR) di tahun 2020. Selain itu, di tahun 2019, OJK juga melakukan kajian penyusunan *Roadmap* Pasar Modal Syariah yang nantinya akan menjadi acuan dalam pengembangan pasar modal syariah 5 (lima) tahun mendatang.



### Revisi POJK Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah



**Rani Permana**

Kepala Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Pengelolaan Investasi



**Kholid Akhsan**

Staf Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Pengelolaan Investasi

Penerbitan dan persyaratan Reksa Dana Syariah (RDS) telah diatur dalam POJK Nomor 19/POJK.04/2015 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2015. Sejak diterbitkan peraturan tersebut, produk reksa dana syariah berkembang secara signifikan, dalam kurun waktu dua tahun, yaitu tahun 2016 – 2017 telah tercatat ada 99 (sembilan puluh sembilan) penerbitan RDS baru. Meskipun cukup banyak produk baru yang diterbitkan, masih terdapat ketentuan yang perlu untuk disempurnakan seperti ketentuan mengenai RDS Berbasis Sukuk masih menimbulkan multi tafsir khususnya terkait batasan investasi pada satu jenis efek, kebutuhan akan diversifikasi efek syariah luar negeri yang menjadi portofolio RDS Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, pengaturan sumber dan penggunaan dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih RDS belum diatur secara rinci dan kebutuhan adanya pengaturan terkait jangka waktu pengumpulan dana kelolaan bagi produk yang berorientasi kepada investor perseorangan, penambahan jenis RDS baru yaitu RDS target waktu, serta pengaturan mengenai pemotongan zakat atas kekayaan RDS. Dengan adanya penyempurnaan Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan pemangku kepentingan RDS.

Pada tahun 2018 dilakukan penyempurnaan atas POJK Nomor 19/POJK.04/2015. Penyempurnaan POJK ini dilakukan atas ketentuan mengenai RDS Berbasis Sukuk dan RDS Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, penambahan jenis RDS baru yaitu RDS target waktu, pengaturan mengenai penggunaan dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih RDS, serta pengaturan mengenai pemotongan zakat atas kekayaan RDS. Dengan adanya penyempurnaan Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan pemangku kepentingan RDS.

Ketua Dewan Komisiner OJK telah menetapkan POJK Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah pada tanggal 13 Desember 2019 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 18 Desember 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan berlakunya POJK ini maka POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pokok-Pokok Perubahan Peraturan

No	Hal	POJK 19/2015	POJK 33/2019
1	RDS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibentuk khusus bagi investor perseorangan	Belum diatur	Diatur
2	RDS Berbasis Sukuk		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batasan investasi RDS Berbasis Sukuk</li> </ul>	RDS Berbasis Sukuk dapat melakukan investasi pada satu atau lebih Sukuk paling sedikit 85% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB)	RDS Berbasis Sukuk berinvestasi pada Sukuk yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak paling banyak 50% dari NAB
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komposisi Portofolio</li> </ul>	RDS Berbasis Sukuk dapat melakukan investasi pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;</li> <li>Surat Berharga Syariah Negara; dan/atau</li> <li>Surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk dalam kategori layak investasi (<i>investment grade</i>) serta dimasukkan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh penerbit surat berharga komersial syariah.</li> </ul>	RDS Berbasis Sukuk dapat melakukan investasi pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;</li> <li>Surat berharga syariah negara; dan/atau</li> <li>Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum</li> </ul>	Tidak diatur	Wajib menyampaikan permohonan pencatatan dengan disertai KIK yang dibuat dengan akta notaris dan dokumen keterbukaan.
3	RDS Penyertaan Terbatas		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengecualian mengenai penjaminan aset atau <i>rating</i></li> <li>Nilai investasi minimum</li> </ul>	Dikecualikan  Rp5 miliar	Diselaraskan dengan ketentuan RDPT Konvensional  Rp1 miliar

No	Hal	POJK 19/2015	POJK 33/2019
4	RDS Berbasis Efek Syariah Luar Negeri	Portofolio efek syariah luar negeri meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Saham Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES.</li> <li>Sukuk yang ditawarkan melalui penawaran umum di luar negeri yang termasuk dalam DES yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES</li> </ul>	Portofolio efek syariah luar negeri meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Saham</li> <li>Sukuk yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih</li> <li>Efek lainnya (misalnya <i>Islamic Real Estate Investment Trusts (iREITs)</i>, dan <i>Islamic Asset-backed securities</i></li> </ul>
5	Jenis RDS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Target Waktu	Belum diatur	RDS berbentuk KIK Target Waktu diatur sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 34/POJK.04/2017
6	Dana yang tidak dapat diakui sebagai NAB RDS	Belum diatur	Pengaturan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber dana yang tidak dapat diakui sebagai NAB RDS.</li> <li>Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai NAB RDS.</li> <li>Kewajiban MI mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai NAB RDS.</li> <li>Larangan penggunaan dana yang tidak dapat diakui sebagai NAB RDS.</li> </ul>



No	Hal	POJK 19/2015	POJK 33/2019
7	Keterbukaan Informasi terkait Zakat	Belum diatur	Pengaturan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengungkapan dalam prospektus mengenai informasi terkait ada atau tidaknya pemotongan zakat atas kekayaan RDS yang dikelolanya.</li> <li>○ Dalam hal Manajer Investasi melakukan pemotongan zakat: KIK dan prospektus mengungkapkan paling sedikit tata cara pemungutan zakat, dasar perhitungan, dan badan atau lembaga amil zakat yang ditunjuk untuk mendistribusikan zakat. Bank Kustodian wajib memuat keterbukaan informasi dalam laporan keuangan tahunan RDS mengenai pelaksanaan pemotongan zakat.</li> <li>○ Pelaksanaan pemotongan zakat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai zakat.</li> </ul>

Dalam perjalanannya, terdapat dinamika penerapan ketentuan POJK ASPM bagi pemegang izin ASPM terkait persyaratan kompetensi, pelaporan, kewajiban Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL), dan pengangkatan sebagai pejabat negara. Selain itu di tahun 2019 terdapat POJK yang terbit terkait Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan kajian bersama harmonisasi ketentuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dilakukan oleh tiga sektor syariah (perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah).

Mempertimbangkan hal tersebut, OJK perlu melakukan revisi atas POJK ASPM. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan suatu kerangka peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan industri keuangan syariah pada umumnya dan pemegang izin ASPM pada khususnya, serta untuk menciptakan pengawasan DPS yang efektif, efisien, dan harmonis di tiga sektor syariah.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam melakukan revisi POJK ASPM antara lain:

- 1) Bentuk ASPM
- 2) Kompetensi ASPM
- 3) Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi
- 4) Lembaga Sertifikasi Profesi
- 5) Pelaporan ASPM
- 6) Ketentuan Cuti
- 7) Rangkap Jabatan DPS
- 8) Service Level Agreement (SLA) dalam perizinan ASPM

### Revisi POJK Nomor 16 tahun 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)



**Syafriil Hendrik**

Kepala Subbagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah  
Bidang Pengelolaan Investasi



**Imam Widyanto**

Staf Subbagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah  
Bidang Pengelolaan Investasi

Dalam membangun kepercayaan pasar di industri jasa keuangan syariah dapat diwujudkan melalui adanya pihak yang mendapat izin dari otoritas untuk melakukan penasihat dan pengawasan prinsip syariah di pasar modal. Untuk menjawab hal tersebut, pada tahun 2015 OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (POJK ASPM).

Adapun hal-hal yang diusulkan menjadi pokok-pokok pengaturan dalam revisi POJK ASPM adalah sebagai berikut:

Bab	POJK Saat Ini	Rancangan POJK Revisi	Substansi Revisi
I	Ketentuan Umum	Revisi	Penambahan definisi
II	Perizinan dan Persyaratan	Revisi	Syarat kompetensi dan rekomendasi DSN-MUI
III	Tata Cara Permohonan Izin	Revisi	Percepatan SLA
IV	Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin	Revisi	Penyederhanaan dokumen
V	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang	Revisi	Kewajiban memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip Syariah di pasar modal



Bab	POJK Saat Ini	Rancangan POJK Revisi	Substansi Revisi
VI	Kewajiban	Revisi	Mengganti PPL dengan sertifikasi ulang
VII	Komite Standar Keahlian	Dihapus	
VIII	Pelaporan	Revisi	Relaksasi jangka waktu dan isi pelaporan
IX	Pengembalian Izin ASPM	Tetap	
X	Ketentuan Lain-Lain	Revisi	Pengangkatan sebagai pejabat negara & penyampaian laporan secara elektronik
XI	Ketentuan Sanksi	Revisi	Besaran denda keterlambatan
XII	Ketentuan Peralihan	Revisi	Perizinan, perpanjangan izin, dan status LSP
XIII	Ketentuan Penutup	Revisi	Mencabut POJK 16/2015 & SEOJK 6/2018
		Ditambahkan Bab Ketentuan Cuti	Durasi dan pelaporan
		Ditambahkan Bab Rangkap Jabatan	Penegasan ketentuan rangkap jabatan

### Kajian dalam rangka Penyusunan Roadmap Pasar Modal Syariah



**Wuri Ekawati Putri**

Kepala Subbagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah Bidang Emiten dan Perusahaan Publik



**Nurul Adilah**

Staf Subbagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah Bidang Emiten dan Perusahaan Publik

Pasar modal syariah kini terus tumbuh dan berkembang yang ditandai dengan tersedianya kerangka hukum yang melandasi kegiatan pasar modal syariah, perkembangan produk, jasa, dan layanan syariah di pasar modal, serta bertambahnya jumlah kepemilikan efek syariah. Pertumbuhan tersebut merupakan hasil kerja keras dari regulator dan *stakeholders* dalam mengimplementasikan seluruh strategi pengembangan pasar modal syariah yang terdapat di dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015 – 2019 sebelumnya.

Namun demikian, pertumbuhan pasar modal syariah dimaksud masih memerlukan upaya lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dari sisi regulasi, meskipun telah terdapat beberapa peraturan yang mengatur khusus mengenai mengenai efek Syariah dan infrastruktur yang mendukung, namun masih perlu dikembangkan peraturan lain yang dapat mendorong pertumbuhan produk dan layanan syariah di pasar modal, termasuk pengembangan produk berbasis filantropi Islam. Sementara itu, porsi *market share* produk syariah di pasar modal (Reksa Dana Syariah dan Sukuk) meskipun terlihat meningkat di setiap tahunnya, namun dari sisi jumlah maupun nilai masih sangat rendah jika dibandingkan dengan produk konvensional. *Market share* jumlah maupun nilai per akhir Juni 2019 masing-masing sebesar 12,23% dan 6,45% untuk Reksa Dana Syariah, serta 16,64% dan 5,70% untuk Sukuk Korporasi.

Kondisi tersebut di atas memerlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan *market share* produk syariah di pasar modal. Upaya tersebut juga perlu didukung dengan meningkatnya jumlah sumber daya manusia di pasar modal syariah yang memiliki kualitas dan kompetensi yang baik. Pemanfaatan teknologi finansial dan industri halal yang saat ini sedang berkembang juga perlu dilakukan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan pasar modal syariah. Selanjutnya, hal lain yang perlu dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan pasar modal syariah, yaitu meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap pasar modal Syariah yang saat ini masih sangat rendah. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan pasar modal syariah juga perlu didukung dengan adanya sinergi dan koordinasi antara regulator dengan seluruh pemangku kepentingan baik dari internal maupun eksternal OJK.

Untuk mempercepat pertumbuhan pasar modal syariah melalui upaya-upaya tersebut di atas, diperlukan strategi yang lebih menyeluruh yang tertuang di dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan kajian meliputi studi pustaka terhadap *roadmap* di dalam negeri dan luar negeri, diskusi dengan *stakeholders* terkait, serta penyusunan *gap analysis* dan *SWOT analysis*. Berbagai *stakeholders* dilibatkan dalam diskusi penyusunan strategi tersebut mengingat pasar modal syariah memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor. Pihak-pihak tersebut antara lain berasal dari pemerintah/regulator, *Self Regulatory Organizations*, asosiasi yang menaungi pelaku industri, akademisi, serta perkumpulan dan organisasi masyarakat.



Berdasarkan hasil dari analisis dan diskusi yang dilakukan dengan seluruh *stakeholder* dimaksud, telah dipetakan hal-hal yang menjadi perhatian dalam pengembangan pasar modal syariah. Pemetaan itu menghasilkan rancangan strategi pengembangan yang akan dilakukan sepanjang 5 (lima) tahun mendatang. Adapun strategi pengembangan pasar modal syariah tersebut diarahkan pada:

- 1) Pengembangan produk dan layanan pasar modal syariah;
- 2) Penguatan infrastruktur dalam rangka pengembangan pasar modal syariah;
- 3) Peningkatan literasi, inklusi, dan edukasi pasar modal syariah terhadap pelaku dan masyarakat; dan
- 4) Penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya, strategi pengembangan ini dijabarkan menjadi program kerja dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh OJK bersama-sama dengan seluruh *stakeholder*. Strategi dan program pengembangan pasar modal syariah tersebut akan dituangkan dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020-2024.

Hasil dari pemetaan strategi pengembangan pasar modal syariah tersebut juga telah disosialisasikan melalui seminar pada tanggal 11 Desember 2019 di Hotel Borobudur Jakarta. Selain melakukan diseminasi hasil Kajian *Roadmap* Pasar Modal Syariah Tahun 2020 – 2024, dalam seminar ini juga mendiskusikan peluang dan tantangan serta strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan pasar modal syariah lima tahun ke depan. Seminar tersebut dimoderatori oleh Irwan Abdalloh selaku Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia, dan diisi oleh pemateri yang mewakili pelaku industri maupun regulator pasar modal syariah, yaitu:

- 1) Moekti Prasetyani Soejachmoen selaku Chief Economist PT Danareksa (Persero) yang menyampaikan paparan terkait Dampak Ekonomi Global terhadap Industri Pasar Modal Syariah Indonesia;
- 2) Legowo Kusumonegoro selaku Presiden Direktur PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang membahas terkait Peluang dan Tantangan Industri Pasar Modal Syariah;
- 3) Luthfi Adhiansyah Muftie selaku Kepala Eksekutif Pendanaan Syariah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang menyampaikan terkait Dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap Industri Pasar Modal Syariah; dan
- 4) Fadilah Kartikasasi selaku Direktur Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memaparkan Arah Pengembangan Pasar Modal Syariah untuk 5 (lima) tahun ke depan.



Seminar Pasar Modal Syariah dengan tema “Perluasan Akses Pasar Modal Syariah untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional”



👍 Like

💬 Comment

➦ Share

Adapun peserta seminar tersebut berasal dari internal OJK, instansi pemerintah dan regulator terkait, *Self-Regulatory Organization*, asosiasi di industri pasar modal maupun non-pasar modal, pelaku industri pasar modal syariah, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) non-bank dan pihak terkait, lembaga pemeringkat, akademisi, perkumpulan dan organisasi masyarakat, serta penyelenggara *Equity Crowd Funding*.

Kegiatan seminar tersebut telah melengkapi hasil kajian roadmap pasar modal syariah. Hasil kajian dan seminar ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan *Roadmap* Pasar Modal Syariah pada tahun 2020, dan akan menjadi rujukan bagi OJK dan *stakeholder* dalam pengembangan pasar modal syariah lima tahun selanjutnya.



## Pengembangan Produk

### Kajian Implementasi Produk Reksa Dana Syariah Berbasis Pertanian



**Rani Permana**

Kepala Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Pengelolaan Investasi



**Kholid Akhsan**

Staf Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Pengelolaan Investasi

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk paling banyak di dunia, sektor pertanian mempunyai peranan yang relatif penting dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Pasar modal sebagai salah satu sektor yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan, saat ini masih terbatas pada penyaluran pendanaan kepada korporasi. Di sektor pertanian sendiri, perusahaan yang memanfaatkan pasar modal relatif masih terbatas.

Pada tahun 2017, Direktorat Pasar Modal Syariah telah melakukan kajian dengan judul “Kajian Produk Investasi Syariah Berbasis Pertanian”. Salah satu rekomendasi kajian tersebut adalah penerbitan pilot project produk investasi syariah di pasar modal dengan menggunakan sukuk dan/atau reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas (RDPT syariah) atau Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk (RDSBS).

Dalam rangka mewujudkan *pilot project* tersebut, dilakukan kajian lanjutan untuk mengidentifikasi pihak yang mendukung dan berminat dalam penerbitan produk reksa dana syariah berbasis pertanian. Hal ini dilakukan dengan melakukan diskusi dengan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dan perusahaan pembiayaan, serta manajer investasi. Selain itu, kajian lanjutan ini juga mengkaji beberapa skema penerbitan reksa dana syariah berbasis pertanian yang melibatkan perusahaan agribisnis, perusahaan pembiayaan dan koperasi sebagai perusahaan sasaran.

Pada kesimpulannya, implementasi penerbitan produk reksa dana syariah berbasis pertanian tidak mudah diwujudkan. Hal ini dikarenakan beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain kurangnya pengetahuan manajer investasi mengenai sektor pertanian, cukup banyaknya dukungan kredit/pembiayaan bersubsidi di sektor pertanian oleh pemerintah, pembiayaan ke petani lebih banyak bersifat ritel sehingga memerlukan tenaga pengawas dan administrasi yang relatif banyak, serta risiko – risiko yang melekat di pertanian itu sendiri seperti risiko produksi, pemasaran, fluktuasi harga hingga kebijakan impor di sektor pertanian.

Untuk dapat mengimplementasikan reksa dana syariah berbasis pertanian, perlu adanya kerja sama antara manajer investasi dengan pihak yang membutuhkan pendanaan yang cukup besar yang belum tercukupi dari pendanaan bersubsidi dalam rangka pembiayaan secara langsung kepada petani maupun pembiayaan terkait sarana atau infrastruktur pertanian. Kerja sama juga dapat dilakukan antara manajer investasi dengan para penyelenggara finansial teknologi di sektor pertanian.

### Kajian Pengaruh Penerbitan DES terhadap Pergerakan Harga Saham



**Risa Arivianto**

Kepala Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Transaksi dan Lembaga Efek



**Firman Nur Rahman**

Staf Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Transaksi dan Lembaga Efek

Daftar Efek Syariah (DES) secara berkala diterbitkan dalam rangka memberikan informasi terbaru kepada penyedia indeks syariah, manajer investasi, investor, dan masyarakat terkait efek syariah khususnya saham yang masuk kategori saham syariah. Dalam setiap penerbitan DES terbaru berarti terdapat saham yang baru masuk (*in*), keluar (*out*) atau tetap dalam DES. Bagi investor yang memiliki preferensi efek syariah maka terdapat kepentingan untuk menyesuaikan portofolio saham yang dimiliki sesuai dengan perubahan DES.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan harga, volume perdagangan, dan volatilitas harga saham pada sebelum dan sesudah pengumuman DES serta menganalisis bagaimana investor, khususnya manajer investasi pengelola reksa dana syariah, mengelola portofolio saham yang keluar dari DES. Ruang lingkup kajian ini dibatasi hanya atas DES yang diumumkan pada periode 2016 s.d. 2018 dan tanggal acuan yang digunakan adalah tanggal surat konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Metode kuantitatif dan kualitatif dilakukan dengan menganalisis data agregat menggunakan metode *t-test for two sample* dan analisis portofolio reksa dana syariah. Analisis tersebut didasarkan pada berbagai sumber data yaitu kajian pustaka dan diskusi dengan narasumber.

Berdasarkan analisis performa saham *in-out* dan yang masuk *out-in* sebelum dan sesudah pengumuman ISSI secara agregat pada tahun 2016 sampai dengan 2018 ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Pada seluruh periode hari (10 hari, 15 hari, 20 hari, dan 25 hari) saham kelompok *out-in* konsisten memiliki performa harga yang lebih baik dibandingkan dengan saham kelompok *in-out*.
- Ditinjau dari volume perdagangan, pada seluruh periode hari, saham *in-out* konsisten menunjukkan peningkatan volume perdagangan sedangkan saham *out-in* konsisten menunjukkan penurunan volume perdagangan.

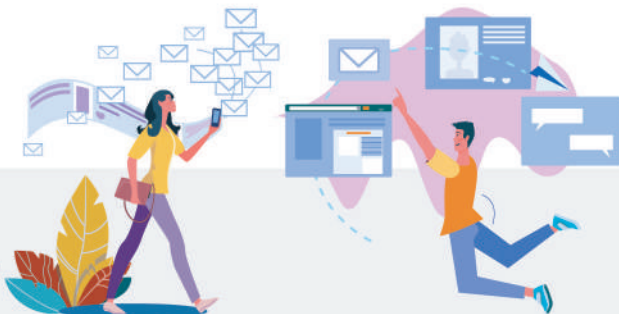
- c. Ditinjau dari volatilitas harga, saham *out-in* konsisten memiliki peningkatan volatilitas yang lebih tinggi dari saham *in-out*. Sedangkan saham *out-in* konsisten mengalami penurunan volatilitas kecuali pada periode 10 hari.
- d. Ditinjau dari perbandingan harga dari kelompok *in-out* dan *out-in*, periode 25 hari merupakan periode yang memiliki selisih harga paling kecil diantara kedua kelompok tersebut. Selain itu, periode 25 hari menunjukkan korelasi yang paling besar diantara kedua kelompok tersebut.

Sedangkan untuk perbandingan antar kelompok yang membandingkan performa harga antara kelompok *in-out*, *out-in*, *in-in*, dan *out-out* menggunakan metode *t-test for two sample*, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara umum, uji tersebut sejalan dengan analisis data agregat pada sub bab sebelumnya, yaitu untuk kelompok periode 20 dan 25 hari, performa saham antar kelompok semakin serupa.
- b. Sedangkan untuk perbandingan kelompok *in-out* dan *out-out* menunjukkan hasil yang konsisten pada seluruh periode hari. Bahwa kedua kelompok tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik.
- c. Pola perbandingan dua kelompok juga terdapat pada saham *in-out* dan *in-in*. Pada rentang kepercayaan 95% dan 90%, hasil menunjukkan bahwa performa saham *in-in* berbeda dan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham *in-out*.

Berdasarkan analisis saham *in-out* yang menjadi portofolio reksa dana syariah saham dapat disimpulkan bahwa penurunan harga saham disebabkan oleh adanya tekanan jual dari reksa dana syariah maupun investor non-syariah yang diduga melakukan spekulasi. Selain itu, batas waktu 10 hari kerja sudah mencukupi bagi manajer investasi. Hal tersebut terlihat dari data yang menunjukkan bahwa banyak saham yang dijual pada awal periode 10 hari kerja. Secara umum manajer investasi dapat mengelola saham *in-out* dengan baik, hal tersebut dikarenakan kepemilikan saham *in-out* dalam portofolio reksa dana relatif rendah, dengan rata-rata di bawah 5%. Selain itu, manajer investasi juga melakukan penyesuaian kepemilikan saham dengan likuiditas harian di pasar sekunder sehingga dapat memudahkan manajer investasi ketika harus menjual portofolionya.

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan tersebut, direkomendasikan bahwa ketentuan 10 hari kerja dapat tetap dipertahankan karena belum terdapat kebutuhan yang mendesak. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan melakukan simulasi, apabila saham yang keluar merupakan saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar dan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi investor syariah lainnya, seperti asuransi syariah.



## Kajian Penerapan Special Purpose Vehicle (SPV) pada Penerbitan Produk Pasar Modal Syariah



**Syafril Hendrik**

Kepala Subbagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah Bidang Pengelolaan Investasi



**Manda Khairatul Aulia**

Staf Subbagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah Bidang Pengelolaan Investasi

Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2002, sukuk terus mengalami peningkatan nilai dan jumlah penerbitan. Namun demikian, berdasarkan data per 30 Agustus 2019, market share penerbitan sukuk korporasi masih relatif kecil, yaitu sebesar 6,75%. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong penerbitan sukuk korporasi Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu melalui diversifikasi skema penerbitan sukuk korporasi menggunakan *Special Purpose Vehicle* (SPV). Hingga saat ini penerbitan sukuk korporasi di Indonesia dilakukan tanpa melalui SPV, berbeda dengan skema penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan *international common practice* yang pada umumnya dilakukan melalui SPV.

Kajian ini ditujukan untuk menganalisis potensi pengaplikasian skema penerbitan sukuk korporasi melalui SPV di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan adanya salah satu usulan ketentuan pada Rancangan Undang-Undang Pasar Modal (RUUPM) yang memungkinkan adanya pembentukan suatu badan hukum yang didirikan dalam rangka mendorong pengembangan pasar modal. Adapun hal-hal yang dianalisis dalam kajian ini antara lain pandangan dari aspek syariah, hukum dan bisnis penerapan SPV pada penerbitan sukuk korporasi, struktur entitas SPV yang digunakan, serta hal-hal yang perlu diatur.

Berdasarkan standar syariah Internasional, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta hasil diskusi dengan anggota DSN-MUI, secara umum tidak terdapat isu syariah yang menghambat penerapan SPV pada penerbitan sukuk korporasi. Sukuk korporasi dapat diterbitkan langsung oleh emiten maupun melalui SPV. Hal ini sejalan dengan penerbitan SBSN yang telah diatur sesuai fatwa DSN-MUI. Berdasarkan hasil diskusi dengan konsultan hukum, kebutuhan SPV muncul untuk tujuan pemenuhan konsep *bankruptcy remoteness* pada penerbitan sukuk korporasi, dengan membentuk entitas hukum baru. Selanjutnya, tinjauan dari aspek bisnis menunjukkan terdapat potensi pengenaan pajak berganda (*double tax*) terutama untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika penerbitan sukuk dilakukan melalui SPV. Skema penerbitan sukuk melalui SPV berpotensi dipahami sebagai dua transaksi yang saling terpisah.

Berkaitan dengan pembentukan SPV untuk penerbitan sukuk korporasi terdapat beberapa alternatif bentuk hukum SPV yang dapat diterapkan di Indonesia sebagai berikut:

- 1) SPV dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang telah digunakan pada penerbitan produk KIK di Indonesia. Namun demikian, KIK bukan merupakan entitas hukum melainkan bentuk hukum.
- 2) SPV berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) menghadapi kendala berupa kompleksitas proses dan biaya. Namun demikian, berdasarkan hasil diskusi dengan konsultan hukum, SPV dalam bentuk PT masih dapat menjadi pilihan dengan adanya penyesuaian pengaturan di level undang-undang.
- 3) SPV berbadan hukum berdasarkan UUPM, menjadikan SPV sebagai entitas khusus yang tidak tunduk pada undang-undang PT. SPV berbadan hukum UUPM saat ini telah menjadi salah satu usulan pengaturan pada RUUPM. Pengaturan mengenai SPV sebagai entitas khusus dibutuhkan karena sistem hukum *civil law* di Indonesia tidak mengenal adanya konsep *trust law*. Namun masih dibutuhkan tambahan beberapa pasal yang mengatur mengenai SPV seperti halnya pengaturan mengenai Perusahaan Penerbit SBSN pada UU SBSN.

Dalam hal SPV berbentuk KIK, maka pembentuknya adalah Manajer Investasi bersama dengan Bank Kustodian dan tidak terdapat pemegang saham. Untuk SPV berbentuk badan hukum berdasarkan UUPM atau UUPM, struktur SPV antara lain terdiri atas *owners*, yaitu pembentuk dan pemilik (pemegang saham) SPV, *governance* atau pengurus, serta *delegates*.

Berdasarkan hasil kajian, struktur SPV yang dianggap paling tepat untuk penerbitan Sukuk Korporasi di Indonesia adalah originator sebagai pembentuk, namun pemilik adalah pihak ketiga. Praktik di luar negeri, pihak ketiga yang dapat menjadi *owners* SPV antara lain *regulator*, *charitable trust*, dan *purpose trust*. Sedangkan dari sisi *governance*, SPV harus dimiliki oleh satu pemegang saham dan direktur yang berjumlah maksimal 2 (dua) orang, yang salah satunya adalah direktur independen yang tidak terafiliasi dengan *originator*. Hasil diskusi dengan narasumber menunjukkan bahwa sesuai dengan praktik di pasar modal Indonesia saat ini, pihak yang dapat menjadi pemegang saham SPV adalah kustodian, sedangkan pihak yang dapat menjabat sebagai direktur SPV pada penerbitan sukuk adalah *ex-officio* dari wali amanat. Selain itu, terdapat fungsi *delegates* yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mewakili investor. Pada praktik saat ini, fungsi *delegates* dilaksanakan oleh wali amanat.

Adapun usulan kajian untuk mengakomodasi penerapan SPV pada penerbitan sukuk korporasi di Indonesia antara lain mengatur pada satu bab khusus pada undang-undang mengenai entitas SPV untuk penerbitan sukuk korporasi, sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan UUPM. Selanjutnya, pengaturan lebih lanjut dapat dilakukan melalui Peraturan OJK. Permasalahan terkait aspek bisnis membutuhkan dukungan kebijakan perpajakan untuk memberikan netralitas pajak pada penerbitan sukuk korporasi melalui SPV.



# Seminar, Sosialisasi, dan Penyuluhan serta Sinergi Pemangku Kepentingan Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah



2,019 likes  
Workshop Pelaku Pasar Modal Syariah #Medan, 30 Agustus 2019

Pasar Modal Syariah



2,019 likes  
Sosialisasi Pasar Modal Syariah di Universitas Muhammadiyah #Gorontalo, Juli 2019

Pasar Modal Syariah



2,019 likes  
OJK dalam acara peluncuran produk syariah pasar modal tahun 2019

Pasar Modal Syariah



2,019 likes  
Sosialisasi Pasar Modal Syariah #Medan, 29 Agustus 2019

Pasar Modal Syariah



2,019 likes  
Showcase dan Booth OJK dalam acara Workshop IFSB sebagai side event ISEF 2019

Pasar Modal Syariah



2,019 likes  
Capital Market Summit & Expo 2019 #Jakarta

Pasar Modal Syariah



2,019 likes  
Pemenang FREKS Kategori Rekomendasi Scopus

Pasar Modal Syariah



2,019 likes  
Ijtima' Tsanawi dan Semiloka Dewan Pengawas Syariah 2019 #Bogor

## Seminar, Sosialisasi, dan Penyuluhan

Dalam rangka meningkatkan tingkat literasi dan inklusi pasar modal syariah, Direktorat Pasar Modal Syariah melakukan berbagai bentuk kegiatan penyuluhan kepada berbagai elemen masyarakat di berbagai belahan wilayah Indonesia.

### Penyelenggaraan Workshop bagi Pelaku Pasar Modal Syariah

Salah satu tantangan perkembangan pasar modal syariah adalah tingkat pemahaman masyarakat mengenai pasar modal syariah khususnya terkait aspek syariah produk pasar modal masih harus ditingkatkan, termasuk para pelaku pasar modal sendiri. Oleh karena itu, Direktorat Pasar Modal Syariah menyelenggarakan kegiatan Workshop Aspek Syariah Pasar Modal untuk sekretaris perusahaan emiten dan perusahaan publik, pelaku pasar modal pemegang izin wakil perantara pedagang efek (WPPE), wakil penjamin emisi efek (WPEE), wakil manajer investasi (WMI), wakil agen penjual reksa dana (WAPERD), serta pihak terkait lainnya. Selama 2019, kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali di tahun 2019, diantaranya:

- Workshop Aspek Syariah Pasar Modal untuk Sekretaris Perusahaan dan Pelaku Pasar Modal pada tanggal 19 Februari 2019 di Jakarta
- Workshop Aspek Syariah Pasar Modal untuk Sekretaris Perusahaan dan Pelaku Pasar Modal pada tanggal 29 Juni 2019 di Bandung
- Workshop Aspek Syariah Pasar Modal untuk Sekretaris Perusahaan dan Pelaku Pasar Modal pada tanggal 30 Agustus 2019 di Medan

Peserta workshop merupakan pihak yang belum sama sekali mendapatkan pengetahuan mengenai pasar modal syariah. Berdasarkan hasil post-test, rata-rata tingkat pemahaman peserta terhadap aspek syariah pasar modal adalah sebesar 66,86%. Dengan kata lain, materi yang dibawakan oleh perwakilan OJK dan DSN-MUI dapat tersampaikan secara baik kepada *stakeholder* pasar modal syariah melalui penyelenggaraan workshop.



### Penyuluhan Pasar Modal Syariah

Sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap produk syariah di pasar modal, Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan beberapa kegiatan, diantaranya:

- Training of Trainer (TOT) Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) pada tanggal 6 April 2019 di Bogor dan 3 Agustus 2019 di Salatiga. Selama 1 hari acara, materi yang disampaikan oleh perwakilan OJK, DSN-MUI, Manajer Investasi dan Perusahaan Efek tersebut disimak secara baik oleh peserta dengan jumlah kurang lebih seratus orang di tiap kota.
- Training of Trainer Pengurus Ikatan Dai Indonesia (IKADI) pada tanggal 13 Juli 2019 di Jakarta dan 31 Agustus 2019 di Medan. Penceramah atau Dai merupakan salah satu stakeholders yang penting dalam penyebaran informasi terkait pasar modal syariah kepada masyarakat. Hal ini mengingat masih banyak masyarakat yang beranggapan aktivitas di pasar modal sebagai aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, di tahun 2019 OJK berinisiatif untuk menyelenggarakan TOT Pengurus IKADI dengan tujuan agar penyebaran materi edukasi pasar modal syariah dapat dilakukan secara masif melalui para dai.
- Training of Trainer Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) pada tanggal 12-13 September 2019 di Lampung. Peserta TOT yang hadir sebagian besar merupakan akademisi yang berkecimpung di bidang ekonomi syariah tetapi belum cukup terliterasi pasar modal syariah. Namun demikian, berdasarkan hasil post-test, tingkat pemahaman peserta TOT mencapai 71,2%. Dengan kata lain, materi TOT pasar modal syariah dapat tersampaikan dengan baik.



- Sosialisasi Pasar Modal Syariah pada tanggal 27 Juli 2019 di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk seminar ini diikuti secara antusias oleh peserta dari kalangan mahasiswa Gorontalo dan sekitarnya. Pembicara seminar terdiri dari perwakilan OJK, Bursa Efek Indonesia dan Perusahaan Efek penyedia Sistem Online Trading Syariah.
- Workshop Investasi melalui Pasar Modal Syariah pada tanggal 12 Desember 2019 di Perbanas Institute. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya OJK untuk meningkatkan edukasi dan literasi akademisi terhadap industri pasar modal syariah. Pembicara terdiri dari perwakilan OJK, MES dan Perusahaan Efek penyedia Sistem Online Trading Syariah.

Pasar Modal Syariah



2,019 likes  
Training of Trainer Pasar Modal Syariah untuk Pengurus MES  
#BoGOR, April 2019

Pasar Modal Syariah



2,019 likes  
Training of Trainer Pasar Modal Syariah untuk Pengurus MES  
#Salatiga, Agustus 2019

Pasar Modal Syariah



2,019 likes  
Training of Trainer untuk Pengurus IKADI  
#Jakarta, Juli 2019

Pasar Modal Syariah



2,019 likes  
Training of Trainer untuk Pengurus IKADI  
#Jakarta, Juli 2019

### Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah

Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) merupakan kegiatan tahunan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dalam rangka mendorong para akademisi dan peneliti untuk melakukan kajian pada berbagai aspek terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah yang dapat dijadikan masukan bagi regulator dan pelaku di industri keuangan syariah Indonesia. FREKS 2019 diselenggarakan pada tanggal 15-16 Oktober 2019 di Universitas Gadjah Mada selaku *Host University* dengan tema “Peningkatan Daya Saing Keuangan Syariah Melalui Inovasi dan Sinergi Menuju *Responsible Finance and Investment* dalam rangka Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.

Acara yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari tersebut diawali dengan *Welcoming Speech* Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU selaku Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam pidatonya, Prof. Panut menyoroti bahwa *demand* produk keuangan syariah belum mampu untuk dipenuhi oleh industri mengingat skala produksi di sisi supply masih relatif kecil. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan FREKS 2019, Prof. Panut sangat berharap bahwa forum ini mampu menjadikan Indonesia sebagai pelopor dalam mengembangkan produk-produk keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah daerah Yogyakarta sebagaimana disampaikan oleh Drs. Trisaktiana selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mewakili Gubernur DIY. Dalam sambutannya, Drs. Trisaktiana juga menyampaikan bahwa DIY sedang membangun bandara Yogyakarta *International Airport* dimana nantinya akan terintegrasi dengan kawasan industri dan kawasan wisata halal. Pemda DIY sangat mendorong produk-produk keuangan syariah bisa ikut menjadi *stakeholder* dalam proyek pembangunan ini. Selanjutnya, kegiatan FREKS dibuka oleh Ir. Hoesen, M.M., Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan *keynote speech* Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Ketua Umum IAEI yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal IAEI Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax.



Kegiatan FREKS mencakup seminar terkait ekonomi dan keuangan Syariah serta presentasi dari 22 finalis *call for paper* yang terbagi menjadi 3 level yaitu peneliti muda, peneliti madya, dan peneliti kategori *scopus*.

Adapun 22 finalis *call for paper* tersebut merupakan hasil seleksi dari total 209 paper yang diterima panitia yang terdiri dari 71 paper untuk sektor perbankan syariah, 74 paper untuk sektor IKNB syariah, 40 paper untuk sektor pasar modal syariah dan 24 paper untuk kategori rekomendasi *scopus*. Berikut daftar pemenang FREKS 2019:

**Kategori Muda**

1. Muhammad Faza Mahendra dan Mega Ayu Setyaningsih, judul paper “Ubah Sampah Jadi Saham Strategi Inovatif Meningkatkan Angka Inklusi Generasi Milenial”
2. Dwiani Kartikasari, judul paper “Hubungan Karakteristik Internal dan Eksternal Bank Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS)”
3. Rangga Indwi Pratama “*Rahn Financing in Macroeconomics and Islamic Pawnshop*”

**Kategori Madya**

1. Rizqi Umar Al Hashfi, Abdul Qoyum, dan Alyta Shabrina Zusryn, judul paper “Apakah Menjadi Investor *Islamic-Socially Responsible Investment* (ISRI) Menguntungkan?”
2. Yaser Taufiq Syamlan Sakinah, judul paper “Produk Deposito Waqf Linked Isthisna (DWLI): Usulan Model, Analisa Akuntansi, dan Manajemen Risiko”
3. Zaki Abdullah, judul paper “Optimalisasi Peran *Crowdfunding* Syariah Berbasis Investasi Untuk UMKM Halal”

**Kategori Rekomendasi Scopus**

1. Erni Masdupi, Aimatul Yumna, dan Destri Ayu Landra, judul paper “*Social Performance and Investment Decision on Listed Sharia Stock in Indonesia*”
2. Ratna Mulyany, Mirna Indriani, dan Indayani, judul paper “*Reviving Salam Product: Stakeholders Perspective With an Extended Canvas Model*”
3. Rezzy Eko Caraka dan Prana Ugiana Gio, judul paper “*Boruta Feature Selection and Spatial Bayes-Logistic Regression of Islamic-Moral Incentives in Credit Card Debt Repayment*”





### Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi

Selain aktif melakukan sosialisasi, Direktorat Pasar Modal Syariah juga dilibatkan oleh berbagai pihak yang mendukung pengembangan pasar modal syariah dalam bentuk seminar, talkshow, workshop maupun peluncuran produk.





2,019 likes  
Roadshow Reksa Dana Syariah oleh MES  
#Gorontalo



2,019 likes  
Sharia Business Forum oleh MES dan SRO



2,019 likes  
Launching produk syariah pasar modal sepanjang tahun 2019



2,019 likes  
Launching produk syariah pasar modal sepanjang tahun 2019

### Sinergi Pemangku Kepentingan Pasar Modal Syariah

Selain meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah melalui berbagai sosialisasi dan penyuluhan, OJK juga bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Komite Nasional Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan antara lain:

#### Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pada tahun 2019 Kementerian Koordinator Bidang perekonomian menjalin sinergi dengan Direktorat Pasar Modal Syariah mengulirkan program Pasar Modal Syariah Goes to Office. Program ini telah diselenggarakan 2 (dua) kali di kota Bandung dan Solo. Program ini ditujukan untuk memperkenalkan investasi di pasar modal syariah kepada aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahan daerah dan kementerian. Selain sosialisasi berupa talkshow dan workshop, acara ini dibarengi dengan expo pelaku industri keuangan yang terdiri dari perbankan, perusahaan efek, dan manajer investasi.



2,019 likes  
Peserta Sosialisasi Pasar Modal Syariah Goes to Office untuk ASN  
#Bandung, September 2020



2,019 likes  
Peserta Sosialisasi Pasar Modal Syariah Goes to Office untuk ASN  
#Bandung, September 2020





### Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

Pada bulan November 2019, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) bekerjasama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta. Sebelum terbentuknya KNKS, ISEF merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia setiap tahunnya dengan rangkaian acara berupa seminar, *workshop*, *call for paper*, *expo* dan *entertainment* dalam rangka memajukan industri halal di Indonesia. Pasar modal syariah sebagai bagian dari industri halal juga berkontribusi pada kegiatan tersebut dalam rangka mensinergikan sektor keuangan syariah dengan sektor terkait lainnya demi keberlangsungan ekosistem halal di Indonesia.

Sebagai *side event* ISEF 2019, OJK juga terlibat dalam penyelenggaraan Workshop Islamic Financial Service Board (IFSB) dengan tema *Islamic Finance for Sustainable Development in the Era of Technological Innovations*. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan sekaligus mempromosikan inovasi produk keuangan syariah di skala internasional yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi digital secara berkesinambungan.

### Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia, OJK setiap tahun bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam penyelenggaraan kegiatan berupa *Ijtima Tsanawi* dan Semiloka Dewan Pengawas Syariah. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 2-4 Oktober 2019 di Bogor dengan tema “Memantapkan Peran DPS dalam rangka Mendukung Arus Baru Ekonomi Indonesia di Era Revolusi Digital”

Dalam sambutannya, K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI menghimbau para DPS dapat meningkatkan kompetensinya untuk menjawab tantangan teknologi di industri keuangan syariah. Tak hanya itu, ia juga berpesan bahwa teknologi harus dipandang sebagai peluang untuk mengoptimalkan produk dan jasa keuangan yang sudah ada, namun tetap dengan batasan-batasan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) juga mendukung pengembangan industri keuangan syariah melalui inovasi produk untuk menggerakkan ekonomi secara nasional. Menurutnya, masyarakat tidak perlu anti dengan utang karena produk seperti sukuk sebagai sumber pendanaan baik perusahaan maupun negara juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai instrumen investasi. Dengan kuatnya basis investor masyarakat dalam negeri, maka ekonomi negara akan lebih kuat dan memiliki daya tahan yang tinggi atas guncangan ekonomi global.

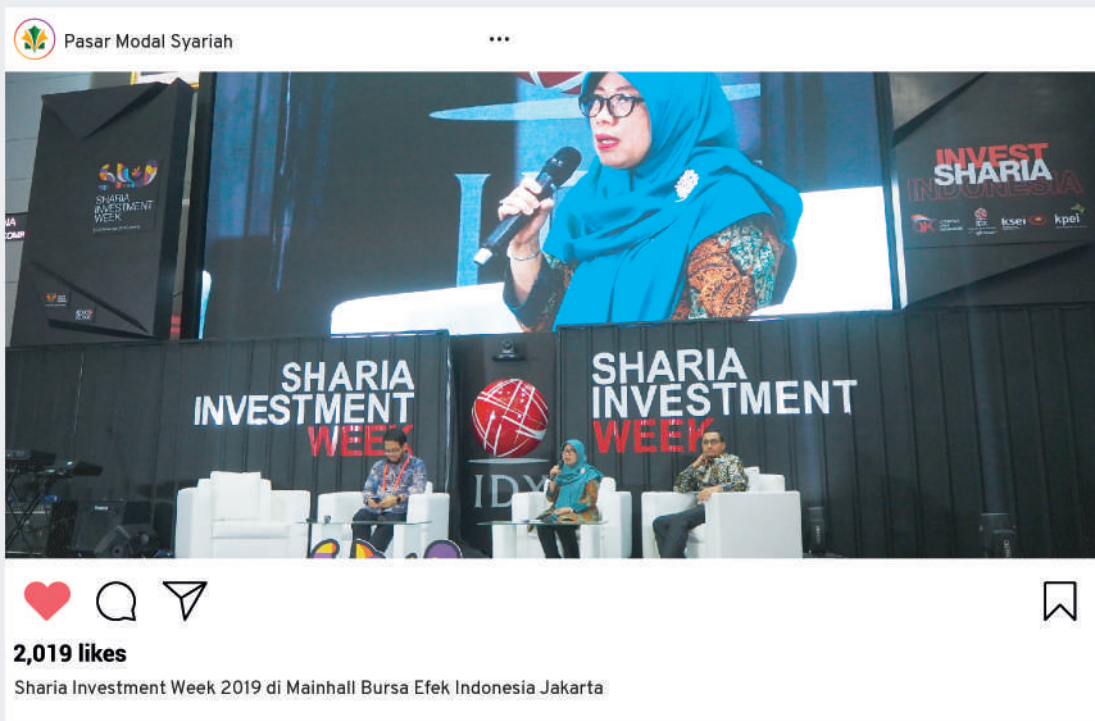


### Bursa Efek Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia secara berkelanjutan terus berupaya mengembangkan industri pasar modal syariah di Indonesia, diantaranya melalui penyelenggaraan acara berupa Capital Market Summit & Expo (CMSE) dan Sharia Investment Week (SIW) 2019. Di tahun 2019, CMSE diselenggarakan di 2 kota yaitu Surabaya pada bulan April dan Jakarta pada bulan Agustus, dengan tema "Pasar Modal untuk Semua". Acara yang diselenggarakan selama dua hari ini diramaikan oleh pembicara profesional di bidang perencana keuangan dan praktisi di bidang pasar modal serta dikunjungi oleh ribuan masyarakat dari berbagai kalangan.

Tahun 2019 juga menjadi tahun pertama penyelenggaraan Sharia Investment Week (SIW). Acara yang didesain khusus untuk stakeholder industri pasar modal syariah ini diselenggarakan pada bulan November 2019 di Mainhall Bursa Efek Indonesia dengan mengusung 3 tema besar, yaitu Masa Depan Pasar Modal Syariah Indonesia, Filantropi Islam dan Fintech di Pasar Modal Syariah, serta Investasi Syariah untuk Kaum Muda dan Keluarga. Dengan rangkaian kegiatan berupa *talkshow*, pameran dan *entertainment*, acara tersebut sukses diramaikan oleh ribuan pengunjung dari berbagai kota dan kalangan.







## Produk dan Layanan Pasar Modal Syariah

Pungkas Tri Widyatmodjo



Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Pasar Modal Syariah

Bayu Kurniawan



Staf Subbagian Pelayanan Informasi Pasar Modal Syariah

Gita Armitawati



Staf Subbagian Pelayanan Informasi Pasar Modal Syariah

### 1. PRODUK PASAR MODAL SYARIAH



Perkembangan pasar modal syariah dapat dilihat dari pertumbuhan produk pasar modal syariah yang terdiri dari saham syariah, reksa dana syariah, sukuk korporasi, dan sukuk negara. Adapun perkembangan produk pasar modal syariah hingga akhir 2019 adalah sebagai berikut:

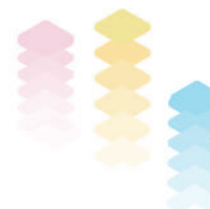


### Saham Syariah

Secara berkala dan insidental OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES). Sepanjang tahun 2019, DES untuk periode I diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor Kep-29/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang berlaku efektif 1 Juni 2019 sampai dengan 30 November 2019. Selanjutnya DES periode II terbit melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-76/D.04/2019 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 22 November 2019. DES tersebut dapat diakses melalui link website OJK. (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/Pages/Keputusan-Dewan-Komisioner-OJK-Nomor-76-tentang-DAFTAR-Efek-Syariah.aspx>)

Penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada review berkala yang dilakukan OJK atas laporan keuangan dan informasi tertulis lain yang diperoleh dari Emiten dan Perusahaan Publik. Efek syariah yang termuat dalam DES periode I meliputi 408 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya dan DES periode II meliputi 435 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya.

Sejak diterbitkannya DES Periode I pada tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 22 November 2019 terdapat penambahan sebanyak 23 saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidental bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham yaitu saham:



PT Bali Bintang Sejahtera Tbk.	PT Eastparc Hotel Tbk.
PT Communication Cable System Indonesia Tbk.	PT Berkah Prima Perkasa Tbk.
PT Golden Flower Tbk.	PT Envy Technologies Indonesia Tbk.
PT Krida Jaringan Nusantara Tbk.	PT Hensen Davest Indonesia Tbk.
PT Bima Sakti Pertiwi Tbk.	PT DMS Propertindo Tbk.
PT Darmi Bersaudara Tbk.	PT Kencana Energi Lestari Tbk.

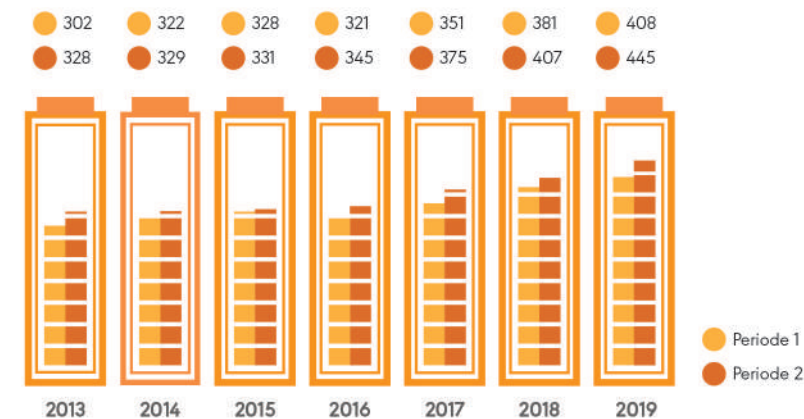


Sedangkan pada periode II, sejak diterbitkannya DES Periode II pada tanggal 22 November 2019 sampai akhir tahun 2019, terdapat penambahan 10 saham yang masuk dalam DES yaitu saham:



Dengan demikian secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES hingga akhir tahun 2019 berjumlah 445 saham.

### Perkembangan Saham Syariah



Berdasarkan sektor industrinya, mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (28,09%). Selanjutnya diikuti sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (15,06%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi (12,81%), sektor Industri Dasar dan Kimia (11,91%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

### Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri



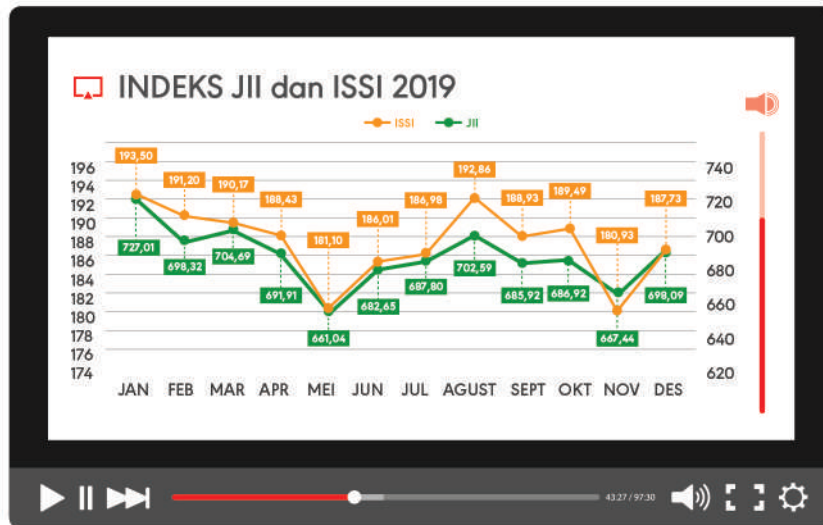
Jumlah Saham Syariah pada penerbitan DES tahun 2019 merupakan jumlah terbanyak sejak pertama kali DES diterbitkan yaitu sebanyak **408** pada periode I dan **435** pada periode II tahun 2019.



Selain DES, sebagai rujukan investor untuk memilih portofolio syariah, terdapat indeks saham syariah yang disusun berdasarkan DES yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Indeks ini diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun indeks saham syariah tersebut adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di BEI. Selain ISSI, terdapat pula indeks saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) yang terdiri dari JII dan JII70. JII adalah indeks saham syariah yang berisi 30 saham syariah yang tercatat di dengan rata-rata nilai kapitalisasi terbesar dan nilai likuiditas perdagangan paling tinggi dalam setahun terakhir. Sedangkan, JII70 terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI.

Perkembangan pasar modal syariah di tahun 2019 mengalami peningkatan positif, sejalan dengan peningkatan pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini, pada tanggal 30 Desember 2019, indeks ISSI ditutup pada level 187,73 poin atau meningkat sebesar 2,03% dibanding akhir tahun 2018. Pada periode yang sama, indeks JII mengalami peningkatan sebesar 1,88% jika dibandingkan akhir 2018, yaitu dari 685,22 poin menjadi 698,09 poin. Dari ketiga indeks syariah, JII70 mengalami persentase peningkatan paling besar, yaitu 2,56% dari 227,55 poin di tahun 2018 menjadi 233,38 poin di akhir 2019.

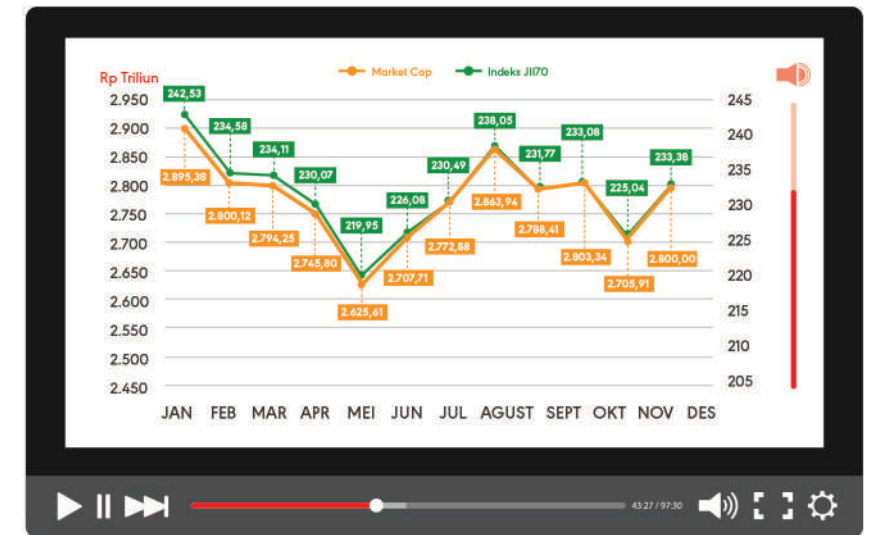
Sepanjang 2019, perkembangan indeks saham syariah baik JII maupun ISSI menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Meskipun kedua indeks pada bulan November mengalami penurunan, namun pada akhir tahun ditutup menguat sebagaimana terlihat pada grafik di bawah.



Perkembangan Indeks JII dan ISSI 2019



Perkembangan Kapitalisasi Pasar JII dan ISSI 2019



Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar JII70 Tahun 2019



Selanjutnya, selama tahun 2019, transaksi dari sisi jumlah saham, nilai saham dan frekuensi atas saham syariah yang tercatat di bursa efek Indonesia adalah sebagai berikut:

#### Jumlah transaksi saham syariah selama tahun 2019

Jenis Pasar	Jumlah saham (juta lembar saham)	Nilai (Rp miliar)	Frekuensi (ribuan kali)
Reguler	290.988	209.988	21.903
Tunai	396.34	440.88	0,15
Negosiasi	204.297	84.539	31
<b>Total</b>	<b>495.086</b>	<b>294.968</b>	<b>21.935</b>
<b>Rata-rata harian</b>	<b>7.859</b>	<b>4.682</b>	<b>348</b>

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Selanjutnya, selama tahun 2019, berikut adalah saham-saham syariah tercatat di bursa efek Indonesia yang menjadi saham *top gainers*, *top losers* serta kapitalisasi saham terbesar.

#### Emiten syariah dengan kenaikan terbesar (*top gainers*)

No.	Emiten	Perubahan Harga (YoY)	Kenaikan (YoY)
1.	PT. Singaraja Putra Tbk.	+1.542	1.427,78%
2.	PT. Krida Jaringan Nusantara Tbk.	+1.858	919,80%
3.	PT. Golden Flower Tbk.	+2.112	733,33%
4.	PT. Menteng Heritage Realty Tbk.	+755	719,05%
5.	PT. Pelangi Indah Canindo Tbk	+1.450	580,00%

Sumber : Bursa Efek Indonesia

#### Emiten syariah dengan penurunan terbesar (*top losers*)

No.	Emiten	Perubahan Harga (YoY)	Kenaikan (YoY)
1.	PT. Alfa Energi Investama Tbk.	-7.424	-95,79%
2.	PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.	-2.228	-92,83%
3.	PT. SMR Utama Tbk.	-600	-92,31%
4.	PT. Cottonindo Ariesta Tbk.	-490	-88,29%
5.	PT. Kioson Komersial Indonesia Tbk.	-2.290	-88,08%

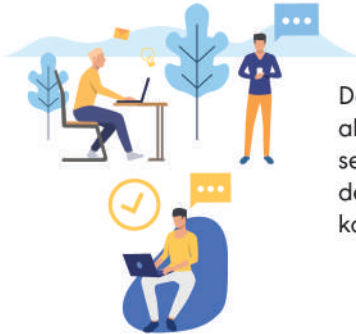
Sumber : Bursa Efek Indonesia

#### Emiten Syariah dengan Kapitalisasi Saham Terbesar

No.	Emiten	Kapitalisasi Pasar (juta rupiah)	Marketshare terhadap IHSG
1.	PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	393.277.000	5,41%
2.	PT. Unilever Indonesia Tbk.	320.460.000	4,41%
3.	PT. Astra International Tbk.	280.348.605	3,86%
4.	PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk.	185.022.773	2,55%
5.	PT. Barito Pacific Tbk.	134.414.147	1,85%

Sumber : Bursa Efek Indonesia





## Sukuk Korporasi

Dalam 5 tahun terakhir, penerbitan sukuk korporasi terus meningkat. Hingga akhir 2019, total sukuk korporasi yang sudah diterbitkan di Indonesia sebanyak 232 seri dengan nilai nominal sebesar Rp48,24 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2019, terdapat 46 emiten yang telah menerbitkan sukuk korporasi.



Perkembangan Sukuk Korporasi



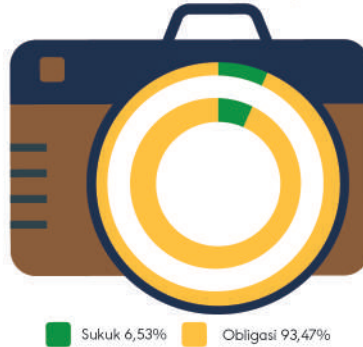
No.	Emiten Penerbit Sukuk Korporasi	No.	Emiten Penerbit Sukuk Korporasi
1.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	24.	PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk
2.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	25.	PT Indosat Tbk
3.	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	26.	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
4.	PT Aneka Gas Industri	27.	PT Matahari Putra Prima Tbk
5.	PT Angkasa Pura I (Persero)	28.	PT Mayora Indah Tbk
6.	PT Apexindo Pratama Duta Tbk	29.	PT Medco Power Indonesia
7.	PT Astra Sedaya Finance	30.	PT Metrodata Electronics Tbk
8.	PT Bakrieland Development Tbk	31.	PT Mitra Adiperkasa Tbk
9.	PT Bank BNI Syariah	32.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
10.	PT Bank BRISyariah	33.	PT PTPN VII (Persero)
11.	PT Bank Bukopin Tbk	34.	PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)
12.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	35.	PT Ricky Putra Globalindo Tbk
13.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	36.	PT Salim Ivomas Pratama
14.	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	37.	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
15.	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	38.	PT Sona Topas Tourism & Industry Tbk
16.	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)	39.	PT Sumberdaya Sewatama
17.	PT Bank Syariah Mandiri	40.	PT Summarecon Agung Tbk
18.	PT Berlian Laju Tanker Tbk	41.	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
19.	PT Berlina Tbk	42.	PT Titan Petrokimia Nusantara
20.	PT Ciliandra Perkasa	43.	PT XL Axiata Tbk
21.	PT Citra Sari Makmur	44.	Timah (Persero) Tbk, Pt
22.	PT CSM Corporatama	45.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
23.	PT Global Mediacom Tbk	46.	PT Mora Telematika Indonesia

Daftar Emiten Penerbit Sukuk Korporasi

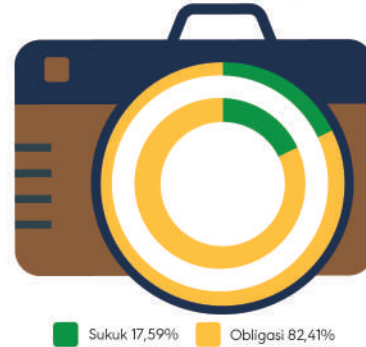


Selama tahun 2019, terdapat penerbitan 57 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp12,12 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan total nilai Rp3,59 triliun, sehingga di akhir Desember 2019, jumlah sukuk korporasi outstanding mencapai 143 sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 17,59% dari 813 total jumlah sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Dari sisi nilai nominal, nilai sukuk korporasi outstanding mencapai Rp29,83 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 6,53% dari total nilai sukuk dan obligasi korporasi outstanding sebesar Rp457,02 triliun. Jika dibandingkan dengan akhir tahun 2018, dimana nominal sukuk outstanding sebesar Rp21,30 triliun, terjadi peningkatan sebesar 40,05%.

Market Share Nilai Sukuk Korporasi



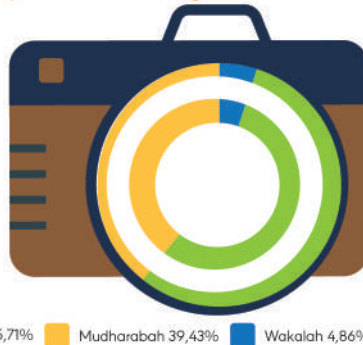
Market Share Jumlah Sukuk Korporasi



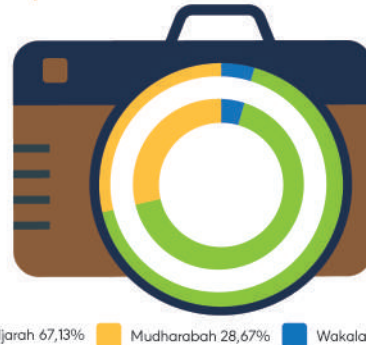
Nilai sukuk korporasi outstanding per akhir tahun 2019 sebesar **RP 29,83 TRILIUN** meningkat sebesar **40,05%** dibandingkan tahun sebelumnya

Hingga tahun 2019, akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk korporasi ada 3, yaitu Akad Ijarah, Mudharabah, dan Wakalah. Dari 143 sukuk korporasi yang outstanding per akhir tahun 2019, terdapat 96 seri sukuk korporasi (67,13%) yang menggunakan akad Ijarah, 41 seri sukuk korporasi (28,67%) menggunakan akad Mudharabah, dan 6 seri sukuk korporasi (4,20%) menggunakan akad Wakalah. Masing-masing akad tersebut mencapai nilai Rp16,62 triliun (55,71%) untuk Ijarah, Rp11,76 triliun (39,43%) untuk Mudharabah, dan Rp 1,45 triliun (4,86%) untuk akad Wakalah.

Proporsi Nilai Outstanding Berdasarkan Jenis Akad



Proporsi Jumlah Seri Berdasarkan Jenis Akad



Ijarah 55,71% Mudharabah 39,43% Wakalah 4,86% Ijarah 67,13% Mudharabah 28,67% Wakalah 4,20%

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, selama tahun 2019 sukuk korporasi telah ditransaksikan sebanyak Rp39,85 triliun, nilai tersebut meningkat sebesar 66,64% dibanding jumlah transaksi tahun 2018 yaitu sebanyak Rp23,92 triliun. Berikut adalah grafik transaksi sukuk korporasi.

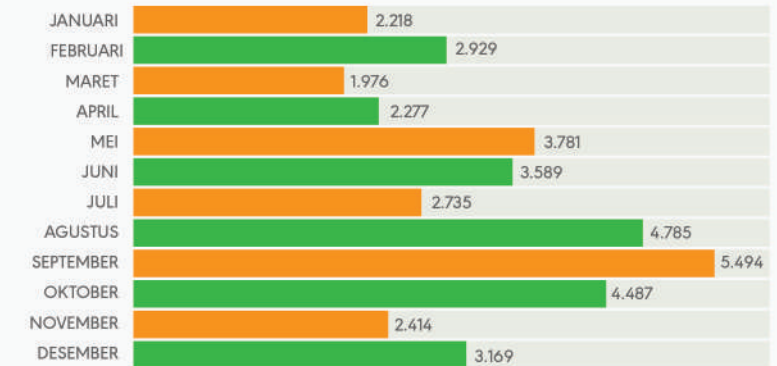
Volume Transaksi Sukuk (Rp Miliar)



Sumber : Data Tahunan 2019, Bursa Efek Indonesia

2019

VOLUME TRANSAKSI SUKUK KORPORASI SELAMA TAHUN 2019 ( RP MILIAR )

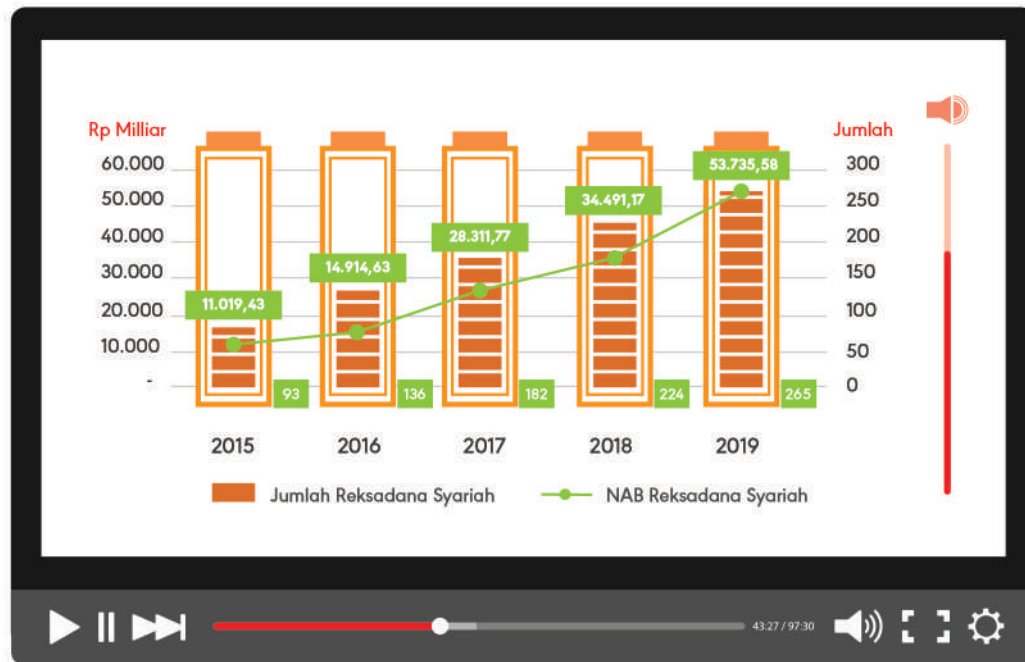


Sumber : Data Bulanan , Bursa Efek Indonesia



## Reksa Dana Syariah

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat 265 reksa dana syariah beredar dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) mencapai Rp53,74 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 18,30% dari jumlah reksa dana syariah akhir tahun 2018 sebanyak 224 reksa dana syariah, dan peningkatan NAB sebesar 55,80% dibanding akhir tahun 2018 sebesar Rp34,49 triliun. Jumlah tersebut dikarenakan adanya 77 reksa dana syariah efektif terbit sepanjang tahun 2019 serta 36 reksa dana syariah bubar.



### Perkembangan Reksadana Syariah



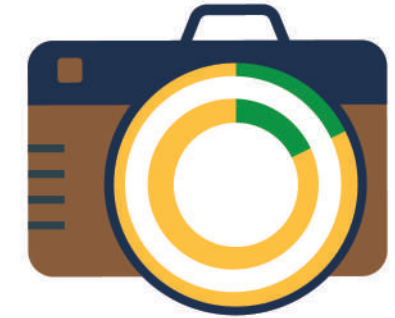
Adapun proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 12,15% dari total 2.181 reksa dana beredar (syariah dan konvensional). Sedangkan proporsi total NAB reksa dana syariah beredar sebesar 9,91% dari total NAB reksa dana beredar.

### Market Share NAB Reksadana Syariah



Reksa Dana Syariah 9,91%  
Reksa Dana Konvensional 90,09%

### Market Share Jumlah Reksadana Syariah



Reksa Dana Syariah 12,13%  
Reksa Dana Konvensional 87,87%

## Proporsi Reksa Dana Syariah Selama Tahun 2015-2019

### PERBANDINGAN JUMLAH REKSA DANA

### PERBANDINGAN NAB (RP. MILIAR)

Tahun	PERBANDINGAN JUMLAH REKSA DANA				PERBANDINGAN NAB (RP. MILIAR)				
	Reksa dana Syariah	Reksa dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%	
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,80	4,40%	
2017	182	1.595	1.777	10,24%	28.311,77	429.194,80	457.506,57	6,19%	
2018	224	1.875	2.099	10,67%	34.491,17	470.899,13	505.390,30	6,82%	
2019	Januari	223	1.871	2.094	10,65%	37.300,97	482.608,59	519.909,57	7,17%
	Februari	233	1.862	2.095	11,12%	36.761,47	484.153,50	520.914,97	7,06%
	Maret	242	1.847	2.089	11,58%	37.114,19	478.502,93	515.617,12	7,20%
	April	243	1.839	2.082	11,67%	35.378,79	476.220,91	511.599,70	6,92%
	Mei	251	1.838	2.089	12,02%	32.448,69	473.638,36	506.087,05	6,41%
	Juni	256	1.837	2.093	12,23%	33.056,75	479.528,56	512.585,31	6,45%
	Juli	262	1.885	2.147	12,20%	48.471,93	488.408,93	536.880,86	9,03%
	Agustus	265	1.919	2.184	12,13%	50.290,50	487.776,19	538.066,69	9,35%
	September	264	1.924	2.188	12,07%	55.543,29	485.368,79	540.912,08	10,27%
	Oktober	264	1.919	2.183	12,09%	57.342,51	495.870,50	553.213,01	10,37%
	November	263	1.900	2.163	12,16%	55.300,47	489.115,32	544.415,79	10,16%
	December	265	1.916	2.181	12,15%	53.735,58	488.460,78	542.196,36	9,91%

Jika dilihat dari jenisnya, reksa dana syariah terbagi atas 9 (sembilan) jenis, yaitu Reksa Dana Syariah Campuran, *Exchange Traded Funds* (ETF), Indeks, Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Terproteksi, Reksadana Efek Luar Negeri dan Reksadana Berbasis Sukuk. Berdasarkan jenisnya, reksa dana syariah yang memiliki proporsi dari sisi NAB terbesar pada akhir tahun 2019 yakni Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 45,67%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah berbasis Efek Luar Negeri sebesar 13,54%, dan Reksa Dana Syariah Pasar Uang masing-masing sebesar 11,66%.

NAB Reksadana Syariah meningkat sebesar **55,80%** dibanding tahun sebelumnya, selain itu pada tahun 2019 proporsi reksadana syariah sebesar **9,91%** dibandingkan seluruh reksadana beredar.

Proporsi Jumlah Reksa Dana Syariah Berdasarkan Jenisnya



- RDS - Mixed 9,81%
- RDS - Saham 23,77%
- RDS - Sukuk 3,77%
- RDS - Indeks 2,26%
- RDS - Pasar Uang 20,75%
- Syariah - ETF 1,13%
- RDS - Terproteksi 20,38%
- RDS - Fixed Income 13,58%
- RDS - Efek Luar Negeri 4,53%

Proporsi NAB Reksa Dana Syariah Berdasarkan Jenisnya



- RDS - Mixed 4,67%
- RDS - Saham 10,79%
- RDS - Sukuk 1,91%
- RDS - Indeks 0,36%
- RDS - Pasar Uang 11,66%
- Syariah - ETF 0,06%
- RDS - Terproteksi 45,67%
- RDS - Fixed Income 11,34%
- RDS - Efek Luar Negeri 13,54%

Surat Berharga Syariah Negara

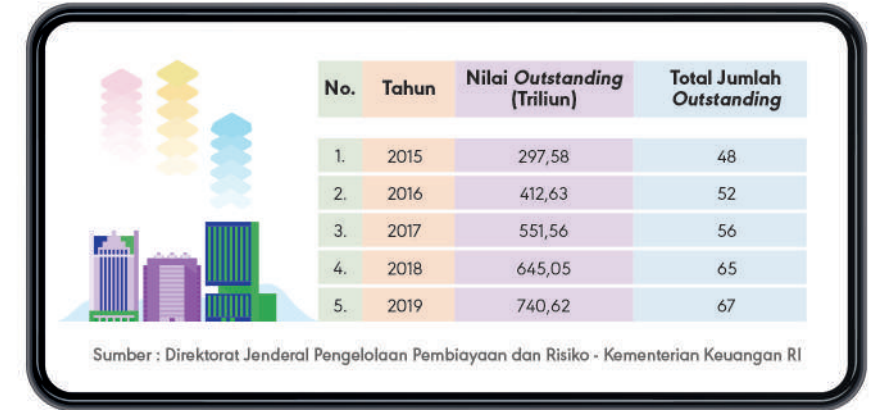
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Penerbitan dan pengelolaan sukuk negara berada di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJP2R).



Sampai dengan akhir Desember 2019, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 67 seri, meningkat 2 seri *outstanding* dibandingkan tahun lalu atau meningkat 3,08% dibandingkan tahun sebelumnya, nilai sukuk negara *outstanding* sebesar Rp740,62 triliun atau meningkat dari sisi nilai sebesar 14,82% dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*



Dari Rp740,62 triliun Sukuk Negara yang beredar, sebanyak Rp485,53 triliun merupakan sukuk negara yang dapat diperdagangkan, sebanyak Rp255,09 triliun merupakan sukuk negara yang tidak dapat diperdagangkan seperti Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). SDHI adalah SBSN yang diterbitkan berdasarkan penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat dalam SBSN oleh Departemen Agama dengan cara *private placement*. Berikut kepemilikan SBN Domestik yang dapat diperdagangkan per akhir 2019.

INSTITUSI	SBSN	
	Rp Triliun	Persentase
<b>BANK*</b>	182,44	37,58
Bank Konvensional	145,68	30,00
Bank Syariah	36,76	7,57
<b>Institusi Negara</b>	53,60	11,04
Bank Indonesia		
(net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank)	53,60	11,04
- Bank Indonesia (gross)	22,38	4,61
- SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank	(31,21)	-6,43
<b>NON-BANK</b>	249,49	51,39
Reksadana	42,47	8,75
Asuransi	52,03	10,72
Non Residen	28,44	5,86
- Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing	7,89	1,63
Dana Pensiun	57,41	11,82
Individu	23,98	4,94
Lain-lain	45,15	9,30
<b>TOTAL</b>	485,53	100,00

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko - Kementerian Keuangan RI

### Keperwakilan SBN Domestik 2019

Catatan:

- 1) Non Residen terdiri dari *Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.*
- 2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan.
- \*) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia.



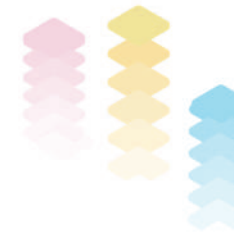
### Investor di Pasar Modal Syariah

Seiring dengan gencarnya kegiatan literasi dan inklusi industri pasar modal syariah oleh OJK dan seluruh pemangku kepentingan, kepemilikan atas efek syariah yang beredar di pasar modal meningkat.

### Komposisi Kepemilikan Efek Syariah

NO.	NAMA EFEK	2017	2018	2019	% YoY
1.	Reksa Dana Syariah	63.536	94.097	258.207	174,41%
2.	Sukuk Korporasi	544	592	709	19,76%

Sumber: Data KSEI

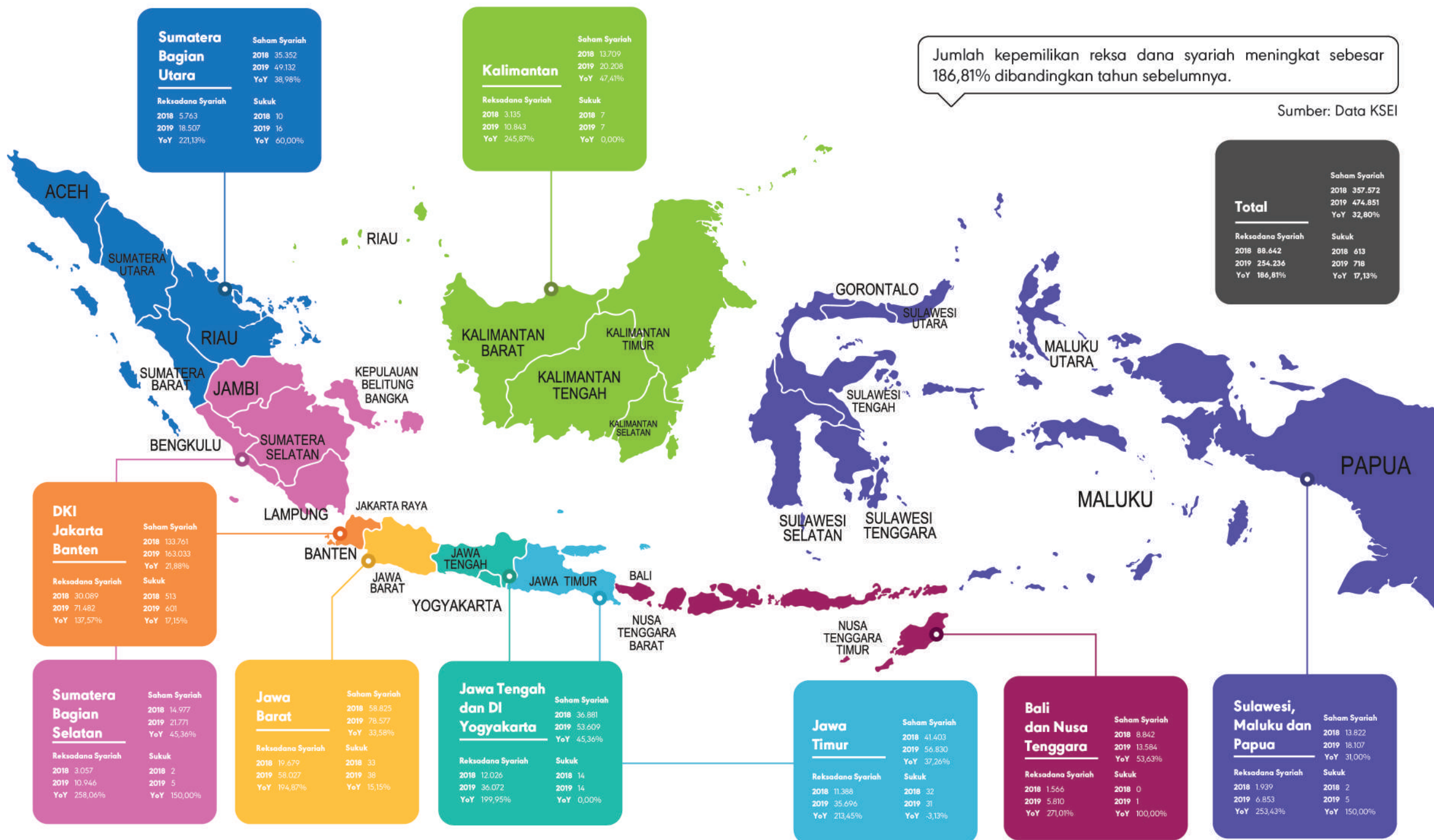


Selain data kepemilikan efek syariah di atas, pertumbuhan investor pasar modal syariah dapat dilihat dari pertumbuhan pengguna sistem online trading syariah. Dari tahun ke tahun investor pengguna SOTS terus bertambah. Dalam 2 (dua) tahun terakhir peningkatan jumlah investor mencapai lebih dari 20.000 investor per tahunnya.

### Pertumbuhan Pengguna Sistem Online Trading Syariah (SOTS)

NO.	KETERANGAN	2017	2018	2019
1.	Jumlah investor	23.207	44.536	68.599
2.	Peningkatan jumlah investor	NA	21.329	24.063
3.	Pertumbuhan	NA	91,91%	54,03%
4.	Rasio Jumlah investor syariah terhadap total investor	3,7%	5,2%	6,2%

Sumber: Data BEI

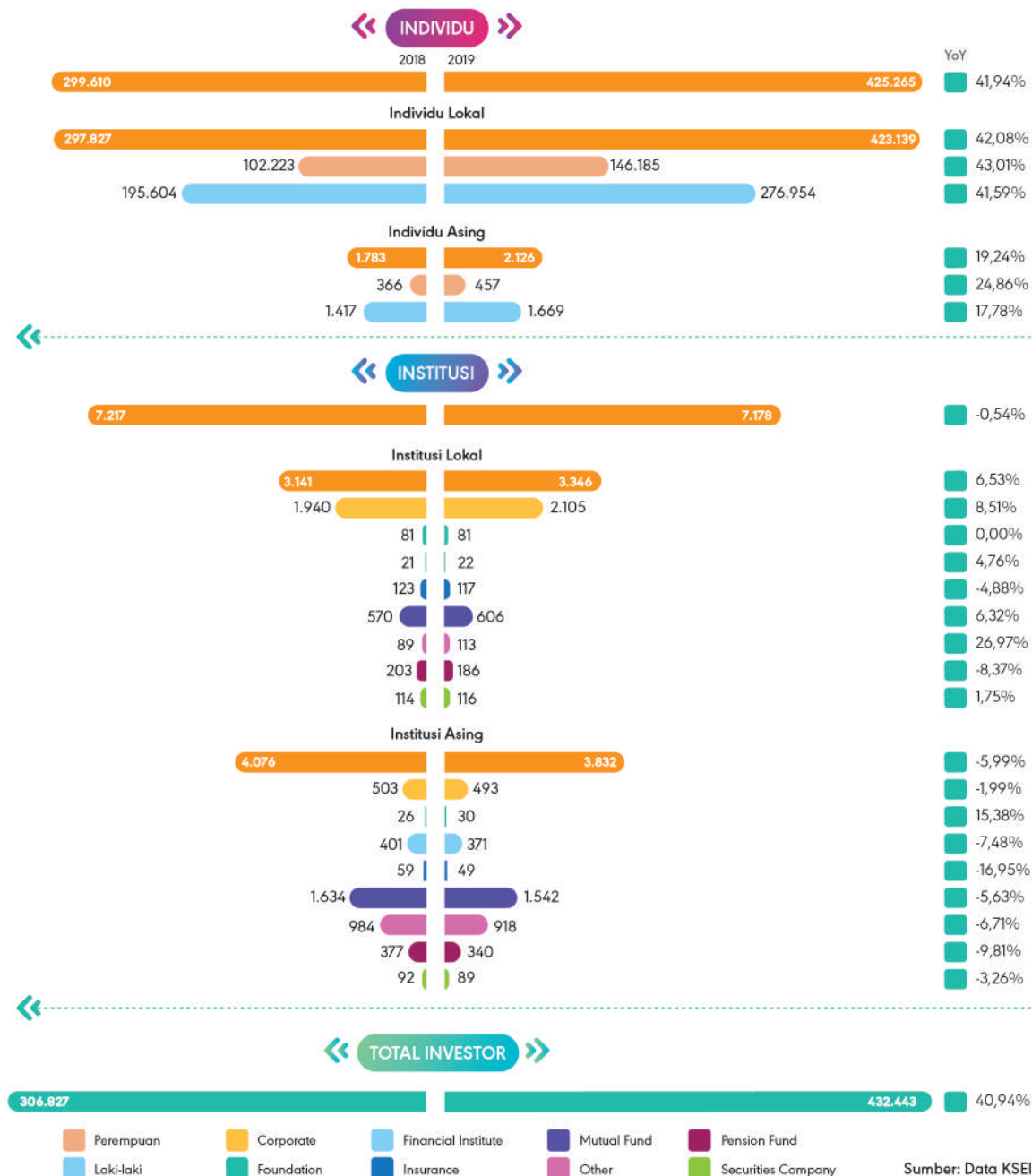


Jumlah kepemilikan reksa dana syariah meningkat sebesar 186,81% dibandingkan tahun sebelumnya.

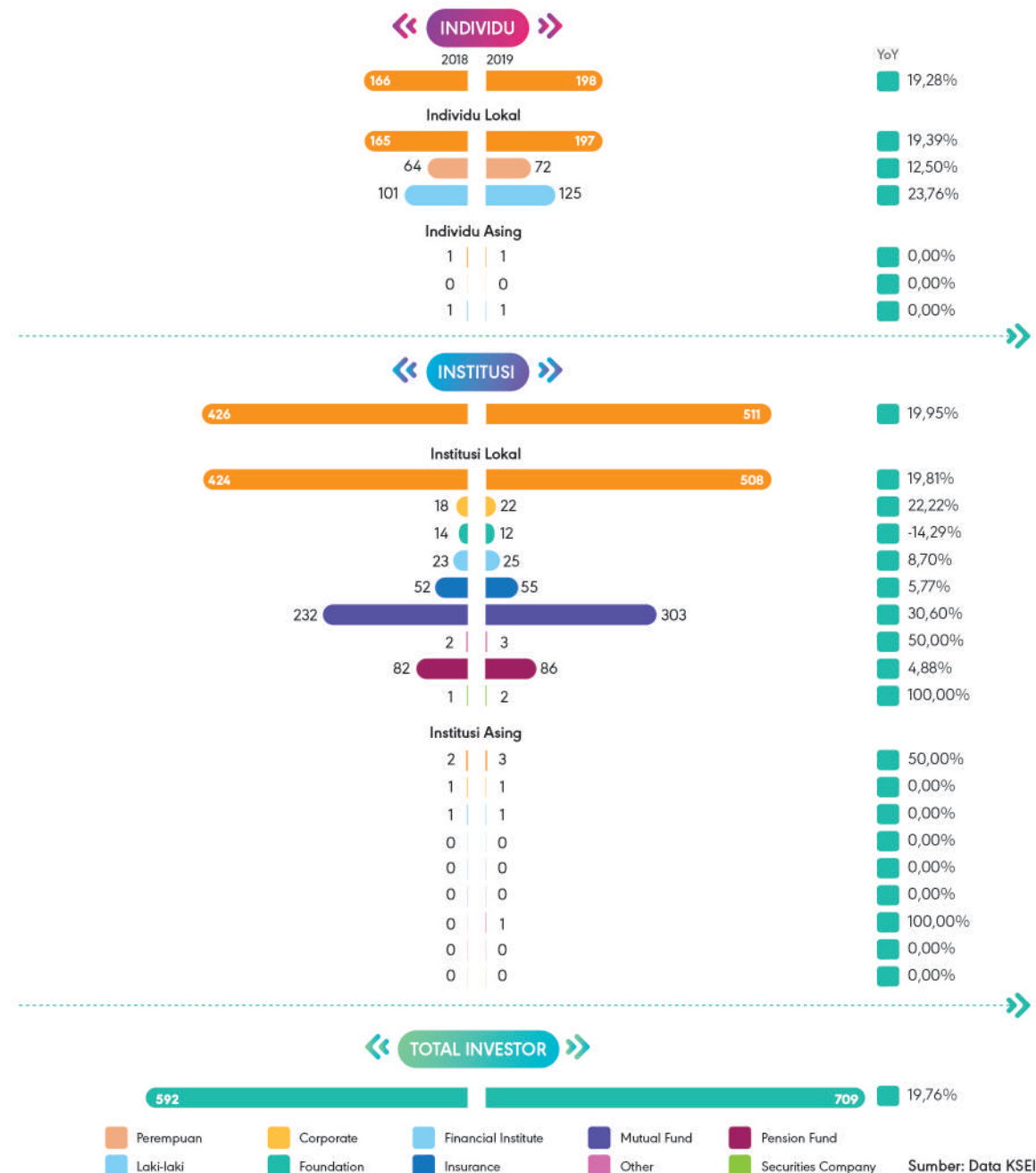
Sumber: Data KSEI



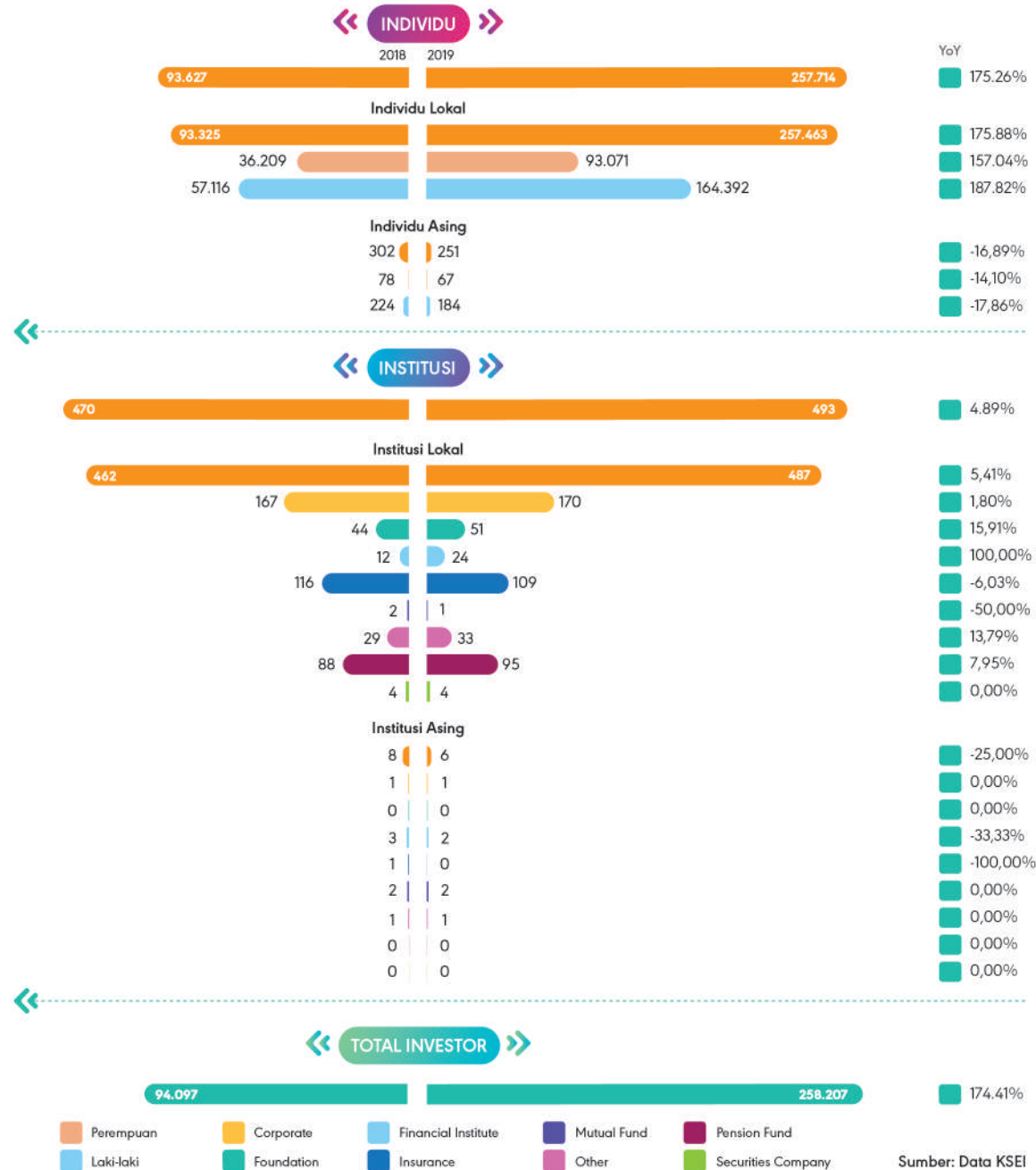
### Perbandingan Jumlah Investor Saham Syariah per 31 Desember 2019



### Perbandingan Jumlah Investor Sukuk Koperasi per 31 Desember 2019



### Perbandingan Jumlah Investor Reksa Dana Syariah per 31 Desember 2019



## 2. LAYANAN DI PASAR MODAL SYARIAH



Selain produk, perkembangan pasar modal syariah dapat pula dilihat perkembangan layanan pasar modal syariah yang meliputi Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) dan Manajemen Investasi Syariah (MIS), layanan bank kustodian untuk reksa dana syariah, wali amanat dan penjaminan emisi penerbitan Sukuk, sistem online trading syariah (SOTS), ahli syariah pasar modal (ASPM), dan layanan lainnya. Adapun perkembangan layanan pasar modal syariah hingga akhir 2019 adalah sebagai berikut:



### Manajer Investasi Syariah (MIS) dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS)

Selama tahun 2019, terdapat 5 Manajer Investasi yang membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS), yaitu PT Nusantara Sentra Kapital, PT Phillip Asset Management, PT Surya Timur Alam Raya, PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi, dan PT Narada Asset Management. Hingga akhir Tahun 2019, terdapat 1 (satu) Manajer Investasi Syariah (MIS) yang telah memiliki izin dari OJK dan 59 (lima puluh sembilan) Manajer Investasi yang telah membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS). Dari keseluruhan Manajer Investasi tersebut, 57 (lima puluh tujuh) Manajer Investasi diantaranya telah mengelola reksa dana syariah. Adapun informasi terkait Manajer Investasi tersebut dapat dilihat pada tabel di lampiran 3.



## Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES)

Sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah pada tahun 2015, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah merupakan salah satu layanan pasar modal syariah yang berkembang pesat. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah merupakan pihak yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah, dimana Daftar Efek Syariah tersebut berisikan efek-efek syariah yang diterbitkan di luar negeri dan selain Daftar Efek Syariah yang telah diterbitkan oleh OJK.

Sepanjang tahun 2019, terdapat 3 (tiga) unit pengelolaan investasi syariah (UPIS) yang menyampaikan laporan untuk menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah berdasarkan POJK 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi dan POJK 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Dengan demikian, hingga akhir 2019 terdapat 13 PPDES. Pada umumnya semua PPDES tersebut menerbitkan Daftar Efek Syariah untuk kepentingan internal, yaitu sebagai referensi pengelolaan portofolio reksa dana berbasis efek syariah luar negeri yang dikelolanya.

No.	Nama Pihak Penerbit DES	Tahun Pengajuan	No.	Nama Pihak Penerbit DES	Tahun Pengajuan
1.	PT Principal Asset Management	2008	8.	PT Maybank Asset Management	2016
2.	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	2015	9.	PT Eastspring Investments Indonesia	2016
3.	PT BNP Paribas Investment Partners	2015	10.	PT Indosurya Asset Management	2017
4.	PT Schroders Investment Management Indonesia	2015	11.	PT RHB Asset Management Indonesia	2019
5.	PT Aberdeen Asset Management	2015	12.	PT Samuel Aset Manajemen	2019
6.	PT Bahana TCW Investment Management	2016	13.	PT Danareksa Investment Management	2019
7.	PT Mandiri Manajemen Investasi	2016			

Daftar Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah per 31 Desember 2019

## Bank Kustodian untuk Reksa Dana Syariah

Bank Kustodian merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan aset keuangan atas kepemilikan reksa dana. Selain bertugas sebagai penyimpanan aset keuangan, bank kustodian juga melaksanakan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima dividen, menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian, serta menyajikan laporan atas seluruh aktivitasnya sebagai kustodian kepada kliennya.

Hingga akhir tahun 2019, terdapat 15 Bank Kustodian yang memberikan layanan bagi Reksa Dana Syariah yang terdiri dari 14 (empat belas) bank kustodian yang merupakan bank umum dan 1 (satu) bank kustodian yang merupakan bank umum syariah. Bank umum syariah yang memberikan layanan bank kustodian adalah Bank Syariah Mandiri yang telah terdaftar pada tanggal 1 Maret 2019.

No.	Nama Bank Kustodian	No.	Nama Bank Kustodian
1.	Bank Citibank	9.	Bank Maybank
2.	Deutsche Bank	10.	Bank Mega
3.	Bank HSBC	11.	Bank Mandiri
4.	Bank Bukopin	12.	Bank Nasional Indonesia (BNI)
5.	Bank CIMB Niaga	13.	Bank Rakyat Indonesia (BRI)
6.	Bank DBS Indonesia	14.	Standard Chartered Bank
7.	Bank Danamon	15.	Bank Syariah Mandiri
8.	Bank Permata		

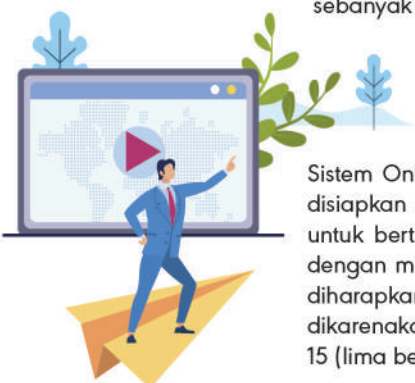
Daftar Bank Kustodian yang Memberikan Layanan bagi Reksa Dana Syariah per 31 Desember 2019



### Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) merupakan pihak yang baru diatur secara detail pada tahun 2015 sejak diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor POJK No.16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. ASPM ini merupakan Pihak yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas terkait dengan aspek kesyariahan dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan opini kesesuaian terhadap prinsip syariah atas produk/jasa syariah di pasar modal.

Dalam praktiknya ASPM yang dapat dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha ini dapat bertindak sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau Tim Ahli Syariah (TAS) dalam penerbitan efek syariah. Dengan adanya ASPM diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap produk syariah di pasar modal. Selama tahun 2019, terdapat 23 (dua puluh tiga) pihak perseorangan yang telah mendapatkan izin sebagai ASPM, sehingga jumlah ASPM yang terdaftar di OJK hingga akhir 2019 sebanyak 115 (seratus lima belas) pihak sebagaimana terlampir dalam lampiran 4.



### Sistem Online Trading Syariah (SOTS)

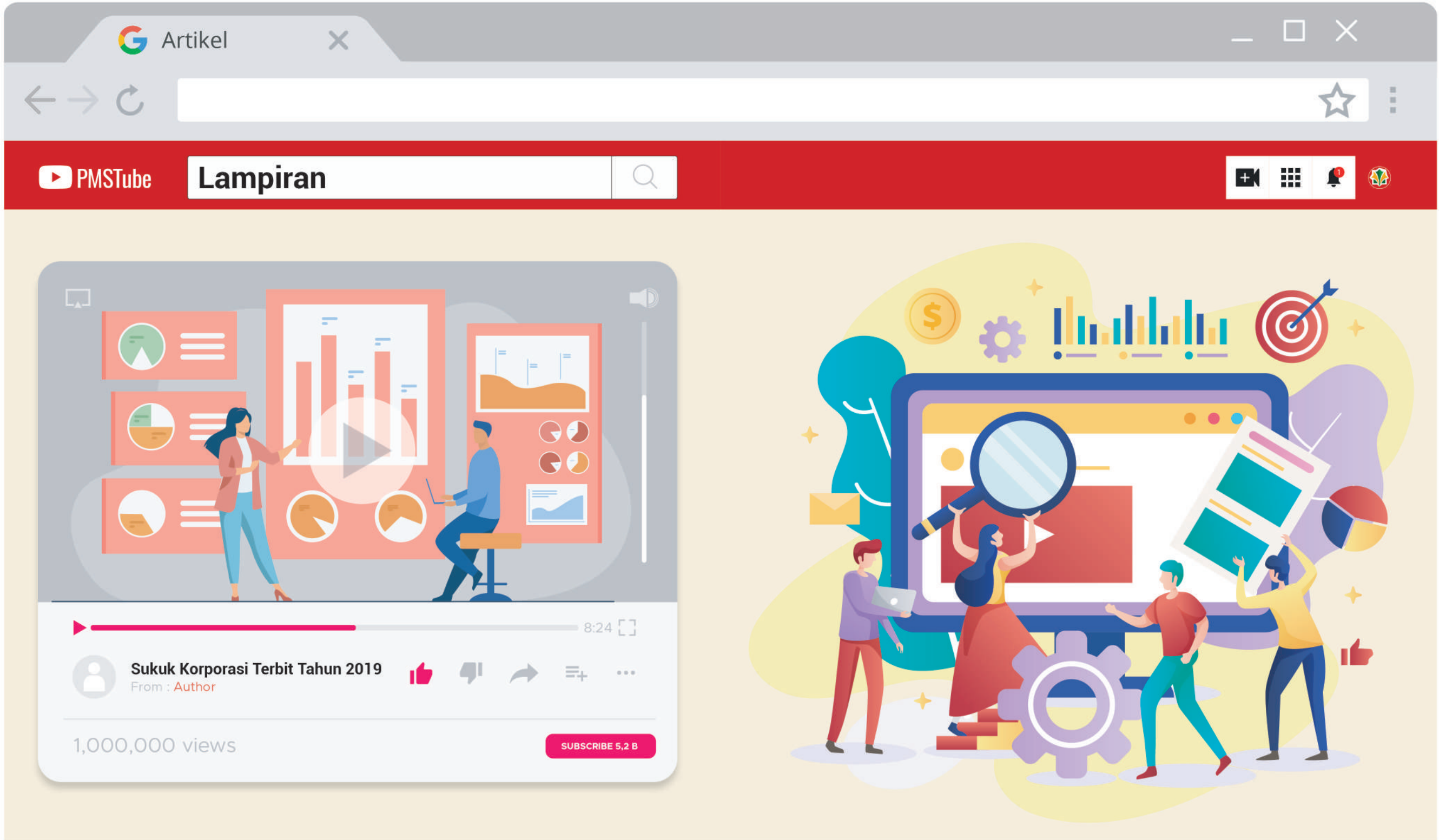
Sistem Online Trading Syariah atau biasa disebut SOTS merupakan sistem yang disiapkan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk digunakan oleh investor untuk bertransaksi pada saham-saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah dengan menggunakan sistem transaksi berbasis online. Pengembangan SOTS ini diharapkan dapat meningkatkan basis investor syariah di pasar modal dikarenakan sistem yang mudah dan nyaman. Hingga akhir tahun 2019, terdapat 15 (lima belas) Anggota Bursa yang memiliki SOTS yaitu:



No.	Nama Anggota Bursa	Tahun Peluncuran
1.	PT Indo Premier Sekuritas	2011
2.	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	2012
3.	PT BNI Sekuritas	2012
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	2012
5.	PT Mandiri Sekuritas	2012
6.	PT Panin Sekuritas Tbk	2012
7.	PT Phintraco Sekuritas	2013
8.	PT Sucor Sekuritas	2014
9.	PT FAC Sekuritas Indonesia	2015
10.	PT MNC Sekuritas	2016
11.	PT Henan Putihrai Sekuritas	2016
12.	PT Phillip Sekuritas Indonesia	2016
13.	PT RHB Sekuritas Indonesia	2018
14.	PT Samuel Sekuritas Indonesia	2019
15.	PT Maybank Kim Eng Sekuritas	2019

 Daftar Perusahaan Efek yang Memberikan Layanan SOTS








berikutnya

-  Sukuk Korporasi Jatuh Tempo Tahun 2019
-  Daftar Manajer Investasi yang Mengelola Reksa Dana Syariah per 31 Desember 2019
-  Daftar Ahli Syariah Pasar Modal per 31 Desember 2019

### Sukuk Korporasi Terbit Tahun 2019



 Pasar Modal Syariah

SUBSCRIBE

No	Sukuk	Akad	Emiten	Nilai (Rp)
1.	BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP III TAHUN 2019 SERI A	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	127.000.000.000
2.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP III TAHUN 2019 SERI B	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	55.000.000.000
3.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP III TAHUN 2019 SERI C	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	32.000.000.000
4.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II TAHUN 2019 SERI A	Ijarah	PT XL Axiata Tbk	351.000.000.000
5.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II TAHUN 2019 SERI B	Ijarah	PT XL Axiata Tbk	110.000.000.000
6.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II TAHUN 2019 SERI C	Ijarah	PT XL Axiata Tbk	138.000.000.000
7.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II TAHUN 2019 SERI D	Ijarah	PT XL Axiata Tbk	15.000.000.000
8.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II TAHUN 2019 SERI E	Ijarah	PT XL Axiata Tbk	26.000.000.000
9.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI A	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	263.000.000.000
10.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI B	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	263.000.000.000
11.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI C	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	204.000.000.000

No	Sukuk	Akad	Emiten	Nilai (Rp)
12.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI D	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	45.000.000.000
13.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI E	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	60.000.000.000
14.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI F	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	28.000.000.000
15.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2019 SERI A	Ijarah	PT Indosat Tbk	348.000.000.000
16.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2019 SERI B	Ijarah	PT Indosat Tbk	91.000.000.000
17.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2019 SERI C	Ijarah	PT Indosat Tbk	29.000.000.000
18.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2019 SERI D	Ijarah	PT Indosat Tbk	11.000.000.000
19.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2019 SERI E	Ijarah	PT Indosat Tbk	21.000.000.000
20.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SMI TAHAP II TAHUN 2019 SERI A	Mudharabah	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	240.000.000.000
21.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SMI TAHAP II TAHUN 2019 SERI B	Mudharabah	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	760.000.000.000
22.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2019	Ijarah	PT Aneka Gas Industri	110.000.000.000
23.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP IV TAHUN 2019 SERI A	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	72.000.000.000
24.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP IV TAHUN 2019 SERI B	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	10.000.000.000
25.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP IV TAHUN 2019 SERI C	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	14.000.000.000
26.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK I TAHAP III TAHUN 2019 SERI A	Mudharabah	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	230.000.000.000
27.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK I TAHAP III TAHUN 2019 SERI B	Mudharabah	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	145.000.000.000
28.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK I TAHAP III TAHUN 2019 SERI C	Mudharabah	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	66.000.000.000
29.	SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA II TAHUN 2019 SERI A	Wakalah	PT Medco Power Indonesia	832.700.000.000
30.	SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA II TAHUN 2019 SERI B	Wakalah	PT Medco Power Indonesia	7.000.000.000

No	Sukuk	Akad	Emiten	Nilai (Rp)
31.	SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA II TAHUN 2019 SERI C	Wakalah	PT Medco Power Indonesia	10.300.000.000
32.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2019	Mudharabah	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	100.000.000.000
33.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2019 SERI A	Ijarah	PT Mora Telematika Indonesia	347.000.000.000
34.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2019 SERI B	Ijarah	PT Mora Telematika Indonesia	653.000.000.000
35.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN 2019 SERI A	Ijarah	PT Indosat Tbk	310.000.000.000
36.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN 2019 SERI B	Ijarah	PT Indosat Tbk	60.000.000.000
37.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN 2019 SERI C	Ijarah	PT Indosat Tbk	404.000.000.000
38.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN 2019 SERI D	Ijarah	PT Indosat Tbk	20.000.000.000
39.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 SERI A	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	274.000.000.000
40.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 SERI B	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	368.000.000.000
41.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 SERI C	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	20.000.000.000
42.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 SERI D	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	49.000.000.000
43.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 SERI E	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	539.000.000.000
44.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019	Ijarah	TIMAH (PERSERO) Tbk, PT	313.000.000.000
45.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP II TAHUN 2019 SERI A	Mudharabah	PT Bank CIMB Niaga Tbk	635.000.000.000
46.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP II TAHUN 2019 SERI B	Mudharabah	PT Bank CIMB Niaga Tbk	936.000.000.000
47.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP II TAHUN 2019 SERI C	Mudharabah	PT Bank CIMB Niaga Tbk	429.000.000.000
48.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP III TAHUN 2019 SERI A	Mudharabah	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	423.000.000.000
49.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP III TAHUN 2019 SERI B	Mudharabah	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	417.000.000.000

No	Sukuk	Akad	Emiten	Nilai (Rp)
50.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP III TAHUN 2019 SERI C	Mudharabah	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	84.000.000.000
51.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP III TAHUN 2019 SERI D	Mudharabah	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	76.000.000.000
52.	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK I TAHAP IV TAHUN 2019	Mudharabah	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	150.000.000.000
53.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 SERI A	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	6.500.000.000
54.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 SERI B	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	10.000.000.000
55.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 SERI C	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	92.000.000.000
56.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 SERI D	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	135.000.000.000
57.	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 SERI E	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	554.000.000.000
<b>Total</b>				<b>12.118.500.000.000</b>





berikutnya

- Daftar Manajer Investasi yang Mengelola Reksa Dana Syariah per 31 Desember 2019
- Daftar Ahli Syariah Pasar Modal per 31 Desember 2019
- Sukuk Korporasi Terbit Tahun 2019

Sukuk Korporasi Jatuh Tempo Tahun 2019

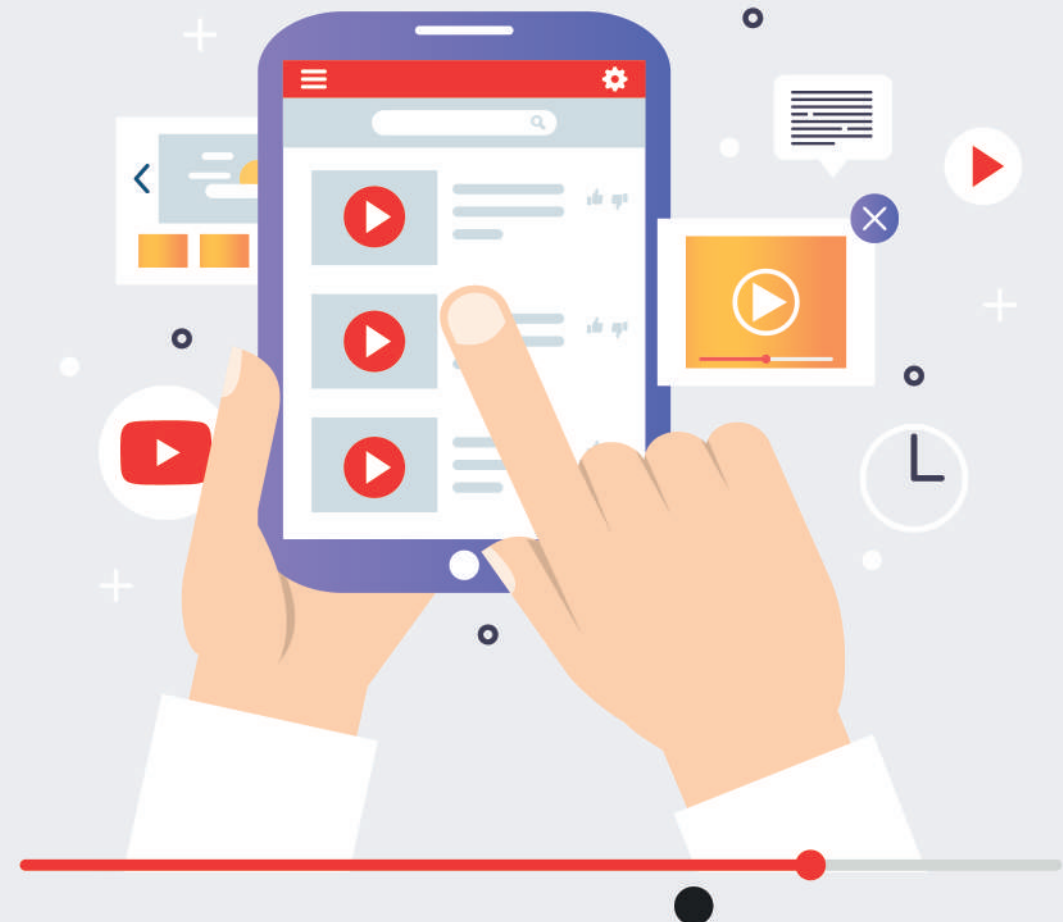


Pasar Modal Syariah

SUBSCRIBE

No	Nama Sukuk	Akad	Nama Penertbit Efek	Nilai Nominal (Rp)
1	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2018 SERI A	Ijarah	PT XL Axiata Tbk	358.000.000.000
2	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI B	Ijarah	PT Indosat Tbk	16.000.000.000
3	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2018 SERI A	Mudharabah	PT Bank CIMB Niaga Tbk	441.000.000.000
4	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK I TAHAP II TAHUN 2018 SERI A	Mudharabah	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	211.500.000.000
5	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2014	Ijarah	PT Summarecon Agung Tbk	300.000.000.000
6	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI B	Ijarah	PT Indosat Tbk	61.000.000.000
7	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2016 SERI B	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	42.000.000.000
8	SUKUK IJARAH INDOSAT V TAHUN 2012	Ijarah	PT Indosat Tbk	300.000.000.000
9	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK I TAHAP I TAHUN 2018 SERI A	Mudharabah	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	135.000.000.000

No	Nama Sukuk	Akad	Nama Penertbit Efek	Nilai Nominal (Rp)
10	SUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP II TAHUN 2016	Mudharabah	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	700.000.000.000
11	SUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP I TAHUN 2018 SERI A	Mudharabah	PT Astra Sedaya Finance	325.000.000.000
12	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 SERI E	Ijarah	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	300.000.000.000
13	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2018 SERI A	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	399.000.000.000
<b>Total</b>				<b>3.588.500.000.000</b>







berikutnya

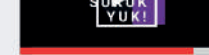
Daftar Ahli Syariah Pasar Modal per 31 Desember 2019



Sukuk Korporasi Terbit Tahun 2019



Sukuk Korporasi Jatuh Tempo Tahun 2019



### Daftar Manajer Investasi yang Mengelola Reksa Dana Syariah per 31 Desember 2019

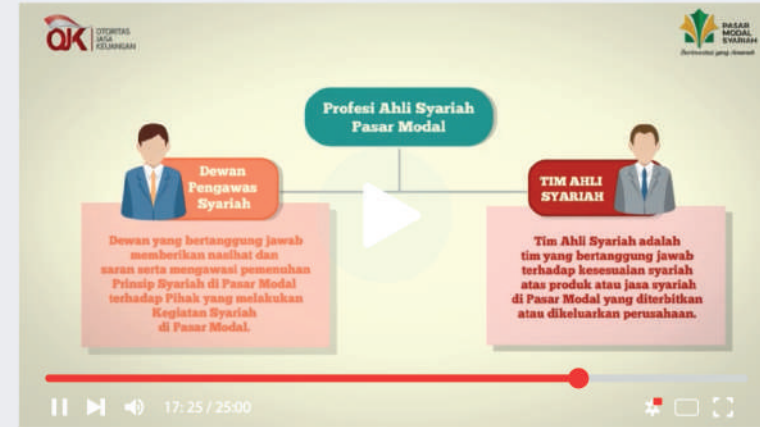
Pasar Modal Syariah

SUBSCRIBE

No	Manajer Investasi	Status	Produk RDS
1.	PT. Paytren Aset Manajemen	MIS	Tersedia
2.	PT. Aberdeen Standards Investment Indonesia	UPIS	Tersedia
3.	PT. Anugerah Sentra Investama	Belum UPIS	Tersedia
4.	PT. Asanusa Asset Management	UPIS	Tersedia
5.	PT. Asia Raya Kapital	UPIS	Tersedia
6.	PT. Aurora Asset Management	UPIS	Tersedia
7.	PT. Avrist Asset Management	UPIS	Tersedia
8.	PT. Bahana TCW Investment Management	UPIS	Tersedia
9.	PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen	UPIS	Tersedia
10.	PT. BNI Asset Management	UPIS	Tersedia
11.	PT. BNP Paribas Investment Partners	UPIS	Tersedia
12.	PT. Bumiputera Manajemen Investasi	UPIS	Tersedia
13.	PT. Capital Asset Management	UPIS	Tersedia
14.	PT. Ciptadana Asset Management	UPIS	Tersedia
15.	PT. Corfina Capital	UPIS	Tersedia

No	Manajer Investasi	Status	Produk RDS
16.	PT. Danareksa Investment Management	UPIS	Tersedia
17.	PT. Eastspring Investments Indonesia	UPIS	Tersedia
18.	PT. Ekuator Swarna Investama	UPIS	Tersedia
19.	PT. EMCO Asset Management	UPIS	Tersedia
20.	PT. GAP Capital	UPIS	Tersedia
21.	PT. Henan Puthrai Asset Management	UPIS	Tersedia
22.	PT. Indo Premier Investment Management	UPIS	Tersedia
23.	PT. Indosurya Asset Management	UPIS	Tersedia
24.	PT. Insight Investments Management	UPIS	Tersedia
25.	PT. Jasa Capital Asset Management	UPIS	Tersedia
26.	PT. Lautandhana Investment Management	UPIS	Tersedia
27.	PT. Majoris Asset Management	UPIS	Tersedia
28.	PT. Mandiri Manajemen Investasi	UPIS	Tersedia
29.	PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia	UPIS	Tersedia
30.	PT. Maybank Asset Management	UPIS	Tersedia
31.	PT. Mega Asset Management	UPIS	Tersedia
32.	PT. Mega Capital Investama	UPIS	Tersedia
33.	PT. Minna Padi Aset Manajemen	UPIS	Tersedia
34.	PT. MNC Asset Management	UPIS	Tersedia
35.	PT. Narada Asset Management	UPIS	Tersedia
36.	PT. OSO Manajemen Investasi	UPIS	Tersedia
37.	PT. Pacific Capital Investment	UPIS	Tersedia
38.	PT. Pan Arcadia Capital d.h PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi	UPIS	Tersedia
39.	PT. Panin Asset Management	UPIS	Tersedia
40.	PT. Phillip Aset Management	UPIS	Tersedia
41.	PT. Pinnacle Persada Investama	UPIS	Tersedia
42.	PT. PNM Investment Management	UPIS	Tersedia
43.	PT. Pool Advista Aset Manajemen d.h PT. Kharisma Asset Management	UPIS	Tersedia
44.	PT. Pratama Capital Assets Management	UPIS	Tersedia
45.	PT. Principal Asset Management d.h PT. CIMB Principal Asset Management	UPIS	Tersedia

No	Manajer Investasi	Status	Produk RDS
46.	PT. Prospera Asset Management	UPIS	Tersedia
47.	PT. Reliance Asset Management	UPIS	Tersedia
48.	PT. RHB Asset Management Indonesia	UPIS	Tersedia
49.	PT. Samuel Aset Manajemen	UPIS	Tersedia
50.	PT. Schroder Investment Management Indonesia	UPIS	Tersedia
51.	PT. Shinhan Asset Management Indonesia d/h PT. Archipelago Asset Management	UPIS	Tersedia
52.	PT. Sinarmas Asset Management	UPIS	Tersedia
53.	PT. Sucorinvest Asset Management	UPIS	Tersedia
54.	PT. Syailendra Capital	UPIS	Tersedia
55.	PT. Treasure Fund Investama	UPIS	Tersedia
56.	PT. Trimegah Asset Management	UPIS	Tersedia
57.	PT. Victoria Manajemen Investasi	UPIS	Tersedia
58.	PT. Nusantara Sentra Kapital	UPIS	Belum Tersedia
59.	PT. Surya Timur Alam Raya	UPIS	Belum Tersedia
60.	PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	UPIS	Belum Tersedia
61.	PT. Kresna Asset Management	UPIS	Belum Tersedia



Daftar Ahli Syariah Pasar Modal per 31 Desember 2019



Pasar Modal Syariah

SUBSCRIBE

berikutnya

- Sukuk Korporasi Terbit Tahun 2019
- Sukuk Korporasi Jatuh Tempo Tahun 2019
- Daftar Manajer Investasi yang Mengelola Reksa Dana Syariah per 31 Desember 2019

No	Nomor SK Izin ASPM	Nama ASPM	Tanggal SK Izin ASPM	Masa Berlaku Izin
1.	KEP-01/D.04/ASPM-P/2016	Muhammad Gunawan Yasni	10-Feb-2016	10-Feb-2021
2.	KEP-02/D.04/ASPM-P/2016	Elsa Fernanda	14-Mar-2016	14-Mar-2021
3.	KEP-03/D.04/ASPM-P/2016	Mohammad Bagus Teguh Perwira	14-Mar-2016	14-Mar-2021
4.	KEP-04/D.04/ASPM-P/2016	Asep Supyadillah	15-Apr-2016	15-Apr-2021
5.	KEP-05/D.04/ASPM-P/2016	Hasanudin	15-Apr-2016	15-Apr-2021
6.	KEP-06/D.04/ASPM-P/2016	Adiwarman A. Karim	15-Apr-2016	15-Apr-2021
7.	KEP-07/D.04/ASPM-P/2016	Rahmat Hidayat	19-May-2016	19-May-2021
8.	KEP-08/D.04/ASPM-P/2016	K.H. Ma'ruf Amin	19-May-2016	19-May-2021
9.	KEP-09/D.04/ASPM-P/2016	Yulizar Djamaluddin Sanrego	19-May-2016	19-May-2021
10.	KEP-10/D.04/ASPM-P/2016	Jaih	19-May-2016	19-May-2021
11.	KEP-11/D.04/ASPM-P/2016	AH. Azharuddin Lathif	19-May-2016	19-May-2021
12.	KEP-12/D.04/ASPM-P/2016	Fathurrahman Djamil	19-May-2016	19-May-2021
13.	KEP-13/D.04/ASPM-P/2016	Jafril Khalil	19-May-2016	19-May-2021
14.	KEP-14/D.04/ASPM-P/2016	Muhammad Faishol	19-May-2016	19-May-2021
15.	KEP-15/D.04/ASPM-P/2016	Elsa Febiola Aryanti	9-Jun-2016	9-Jun-2021
16.	KEP-16/D.04/ASPM-P/2016	Muhamad Nadrattuzaman Hosen	10-Jun-2016	10-Jun-2021

No	Nomor SK Izin ASPM	Nama ASPM	Tanggal SK Izin ASPM	Masa Berlaku Izin
17.	KEP-17/D.04/ASPM-P/2016	Kanny Hidayat	16-Jun-2016	16-Jun-2021
18.	KEP-18/D.04/ASPM-P/2016	Ikhwan Abidin	16-Jun-2016	16-Jun-2021
19.	KEP-19/D.04/ASPM-P/2016	Asrorun Ni'am Sholeh	17-Jun-2016	17-Jun-2021
20.	KEP-20/D.04/ASPM-P/2016	Abd Wasik	22-Jul-2016	22-Jul-2021
21.	KEP-21/D.04/ASPM-P/2016	Ahmadi Sukarno	8-Aug-2016	8-Aug-2021
22.	KEP-22/D.04/ASPM-P/2016	Irfan Syauqi Beik	8-Aug-2016	8-Aug-2021
23.	KEP-23/D.04/ASPM-P/2016	Akhmad Baidun	15-Aug-2016	15-Aug-2021
24.	KEP-24/D.04/ASPM-P/2016	Mohammad Baharun	19-Aug-2016	19-Aug-2021
25.	KEP-25/D.04/ASPM-P/2016	Muhammad Anwar Ibrahim	29-Aug-2016	29-Aug-2021
26.	KEP-26/D.04/ASPM-P/2016	Endy Muhammad Astiwara	31-Aug-2016	31-Aug-2021
27.	KEP-27/D.04/ASPM-P/2016	Didin Hafidhuddin	27-Sep-2016	27-Sep-2021
28.	KEP-28/D.04/ASPM-P/2016	Aminudin Yakub	27-Sep-2016	27-Sep-2021
29.	KEP-29/D.04/ASPM-P/2016	Jaenal Effendi	26-Oct-2016	26-Oct-2021
30.	KEP-30/D.04/ASPM-P/2016	Muhammad Sofwan Jauhari	25-Nov-2016	25-Nov-2021
31.	KEP-31/D.04/ASPM-P/2016	Mohamad Hidayat	20-Dec-2016	20-Dec-2021
32.	KEP-32/D.04/ASPM-P/2016	Nuruddin Mhd Ali	28-Dec-2016	28-Dec-2021
33.	KEP-01/D.04/ASPM-P/2017	Mukhamad Yasid	27-Jan-2017	27-Jan-2022
34.	KEP-02/D.04/ASPM-P/2017	Muhammad Firdaus	17-Feb-2017	17-Feb-2022
35.	KEP-03/D.04/ASPM-P/2017	H. Noor Achmad	30-Mar-2017	30-Mar-2022
36.	KEP-04/D.04/ASPM-P/2017	H. Muhammad Riza Aziziy	4-Apr-2017	4-Apr-2022
37.	KEP-05/D.04/ASPM-P/2017	Rofiqul Umam	6-Apr-2017	5-Apr-2022
38.	KEP-06/D.04/ASPM-P/2017	Habibullah	6-Apr-2017	8-Apr-2022
39.	KEP-07/D.04/ASPM-P/2017	Izzuddin Edi Siswanto	25-Apr-2017	25-Apr-2022
40.	KEP-08/D.04/ASPM-P/2017	Muhammad Maksum	17-May-2017	17-May-2022
41.	KEP-09/D.04/ASPM-P/2017	Arwani	23-May-2017	23-May-2022
42.	KEP-01/PM.22/ASPM-P/2017	Dede Abdul Fatah	4-Sep-2017	4-Sep-2022
43.	KEP-02/PM.22/ASPM-P/2017	Ahmad Munif Suratmaputra	20-Sep-2017	20-Sep-2022
44.	KEP-03/PM.22/ASPM-P/2017	Yunahar Ilyas	22-Sep-2017	22-Sep-2022
45.	KEP-04/PM.22/ASPM-P/2017	Oni Sahroni	22-Sep-2017	22-Sep-2022
46.	KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017	Iggi Haruman Achsien	10-Oct-2017	10-Oct-2022
47.	KEP-06/PM.22/ASPM-P/2017	Basuki Achmad	10-Oct-2017	10-Oct-2022

No	Nomor SK Izin ASPM	Nama ASPM	Tanggal SK Izin ASPM	Masa Berlaku Izin
48.	KEP-07/PM.22/ASPM-P/2017	Nibrasul Huda Ibrahim Hosen	10-Oct-2017	10-Oct-2022
49.	KEP-08/PM.22/ASPM-P/2017	Akhsin Muamar	10-Oct-2017	10-Oct-2022
50.	KEP-09/PM.22/ASPM-P/2017	Sisca Debyola Widuhung	10-Oct-2017	10-Oct-2022
51.	KEP-10/PM.22/ASPM-P/2017	Uswatun Hasanah	25-Oct-2017	25-Oct-2022
52.	KEP-11/PM.22/ASPM-P/2017	Pupun Saepul Rohman	25-Oct-2017	25-Oct-2022
53.	KEP-12/PM.22/ASPM-P/2017	Fajar Rudityo	25-Oct-2017	25-Oct-2022
54.	KEP-13/PM.22/ASPM-P/2017	Nanda Meiliza Puspita	1-Nov-2017	1-Nov-2022
55.	KEP-14/PM.22/ASPM-P/2017	Agus Haryadi	1-Nov-2017	1-Nov-2022
56.	KEP-15/PM.22/ASPM-P/2017	Latifah Hanum	9-Nov-2017	9-Nov-2022
57.	KEP-16/PM.22/ASPM-P/2017	Abd Jabar Majid	9-Nov-2017	9-Nov-2022
58.	KEP-17/PM.22/ASPM-P/2017	Muhammad Syafii Antonio	9-Nov-2017	9-Nov-2022
59.	KEP-18/PM.22/ASPM-P/2017	Amirsyah	16-Nov-2017	16-Nov-2022
60.	KEP-19/PM.22/ASPM-P/2017	Shaifurrokhman Mahfudz	17-Nov-2017	17-Nov-2022
61.	KEP-20/PM.22/ASPM-P/2017	Ahmad Nuryadi Asmawi	17-Nov-2017	17-Nov-2022
62.	KEP-21/PM.22/ASPM-P/2017	Ahmad Rofiq	29-Nov-2017	29-Nov-2022
63.	KEP-01/PM.22/ASPM-P/2018	Yosa Gumelar	30-Jan-2018	30-Jan-2023
64.	KEP-02/PM.22/ASPM-P/2018	Dwi Tjahjo Purnomo	30-Jan-2018	30-Jan-2023
65.	KEP-03/PM.22/ASPM-P/2018	Justitia Tripurwasani	30-Jan-2018	30-Jan-2023
66.	KEP-04/PM.22/ASPM-P/2018	Wahju Rohmati	30-Jan-2018	30-Jan-2023
67.	KEP-05/PM.22/ASPM-P/2018	Awang Muda Satria	8-Feb-2018	8-Feb-2023
68.	KEP-06/PM.22/ASPM-P/2018	Aini Masruroh	8-Feb-2018	8-Feb-2023
69.	KEP-07/PM.22/ASPM-P/2018	Hafizuddin Ahmad	19-Feb-2018	19-Feb-2023
70.	KEP-08/PM.22/ASPM-P/2018	Firdaus	28-Feb-2018	28-Feb-2023
71.	KEP-09/PM.22/ASPM-P/2018	Yuke Rahmawati	6-Mar-2018	6-Mar-2023
72.	KEP-10/PM.22/ASPM-P/2018	Erlina Sugiarti	12-Mar-2018	12-Mar-2023
73.	KEP-11/PM.22/ASPM-P/2018	Sutrisna Amijaya	15-Mar-2018	15-Mar-2023
74.	KEP-12/PM.22/ASPM-P/2018	M. Noor Rachman	9-Apr-2018	9-Apr-2023
75.	KEP-13/PM.22/ASPM-P/2018	Anis Baridwan	23-Apr-2018	23-Apr-2023
76.	KEP-14/PM.22/ASPM-P/2018	Mahbub Ma'afi Ramdhan	23-Apr-2018	23-Apr-2023
77.	KEP-01/PM.2/ASPM-P/2018	Mukhamad Ali Yusuf	18-May-2018	18-May-2023
78.	KEP-02/PM.2/ASPM-P/2018	Berlianto Haris	29-Jun-2018	29-Jun-2023

No	Nomor SK Izin ASPM	Nama ASPM	Tanggal SK Izin ASPM	Masa Berlaku Izin
79.	KEP-03/PM.2/ASPM-P/2018	Teuku Rahmatsyah	25-Jul-2018	25-Jul-2023
80.	KEP-04/PM.2/ASPM-P/2018	Mizan Seno Adi	20-Aug-2018	20-Aug-2023
81.	KEP-05/PM.2/ASPM-P/2018	Budi Suwasono	20-Aug-2018	20-Aug-2023
82.	KEP-06/PM.2/ASPM-P/2018	Adni Kurniawan	20-Aug-2018	20-Aug-2023
83.	KEP-07/PM.2/ASPM-P/2018	Rully Intan Agustian R	20-Aug-2018	20-Aug-2023
84.	KEP-08/PM.2/ASPM-P/2018	Titik Hinawati	28-Aug-2018	28-Aug-2023
85.	KEP-09/PM.2/ASPM-P/2018	Naila Firdausi	4-Sep-2018	4-Sep-2023
86.	KEP-10/PM.2/ASPM-P/2018	Dida Nurhaida	14-Sep-2018	14-Sep-2023
87.	KEP-11/PM.2/ASPM-P/2018	Ayu Widuri	4-Oct-2018	4-Oct-2023
88.	KEP-12/PM.2/ASPM-P/2018	Harris Sorimuda Dalimunthe	4-Oct-2018	4-Oct-2023
89.	KEP-13/PM.2/ASPM-P/2018	Yulhendri	24-Oct-2018	24-Oct-2023
90.	KEP-01/PM.223/ASPM-P/2018	Setyo Utomo	12-Dec-2018	12-Dec-2023
91.	KEP-02/PM.223/ASPM-P/2018	Beba Hawah Ria	12-Dec-2018	12-Dec-2023
92.	KEP-03/PM.223/ASPM-P/2018	Rian Wisnu Murti	21-Dec-2018	21-Dec-2023
93.	KEP-01/PM.223/ASPM-P/2019	Anwar Sahal	7-Jan-2019	7-Jan-2024
94.	KEP-02/PM.223/ASPM-P/2019	Nuryana Hidayat	15-Jan-2019	15-Jan-2024
95.	KEP-03/PM.223/ASPM-P/2019	R. Budi Ginanjar	28-Jan-2019	28-Jan-2024
96.	KEP-04/PM.223/ASPM-P/2019	Suryadi	13-Feb-2019	13-Feb-2024
97.	KEP-05/PM.223/ASPM-P/2019	Nurhadi	5-Mar-2019	5-Mar-2024
98.	KEP-06/PM.223/ASPM-P/2019	Budi Wihartanto	5-Mar-2019	5-Mar-2024
99.	KEP-07/PM.223/ASPM-P/2019	Riri Ariestini	22-Apr-2019	22-Apr-2024
100.	KEP-08/PM.223/ASPM-P/2019	Usman Hidayat	10-May-2019	10-May-2024
101.	KEP-09/PM.223/ASPM-P/2019	Gatot Yulianto	16-May-2019	16-May-2024
102.	KEP-10/PM.223/ASPM-P/2019	Iyon Sutiyono	21-May-2019	21-May-2024
103.	KEP-11/PM.223/ASPM-P/2019	Rini Subarningsih	13-Jun-2019	13-Jun-2024
104.	KEP-12/PM.223/ASPM-P/2019	Heru Irvansyah	12-Jul-2019	12-Jul-2024
105.	KEP-13/PM.223/ASPM-P/2019	Iqra Wiarta	22-Jul-2019	22-Jul-2024
106.	KEP-14/PM.223/ASPM-P/2019	Akhmad Affandi Mahfudz	8-Aug-2019	8-Aug-2024
107.	KEP-15/PM.223/ASPM-P/2019	Budi Santoso	14-Aug-2019	14-Aug-2024
108.	KEP-16/PM.223/ASPM-P/2019	Dedy Hendrawan	20-Aug-2019	20-Aug-2024
109.	KEP-17/PM.223/ASPM-P/2019	Muhammad Karim	4-Sep-2019	4-Sep-2024

No	Nomor SK Izin ASPM	Nama ASPM	Tanggal SK Izin ASPM	Masa Berlaku Izin
110.	KEP-18/PM.223/ASPM-P/2019	Hendry	5-Nov-2019	5-Nov-2024
111.	KEP-19/PM.223/ASPM-P/2019	Tri Meryta	5-Nov-2019	5-Nov-2024
112.	KEP-20/PM.223/ASPM-P/2019	M. Adi Wicaksono	5-Nov-2019	5-Nov-2024
113.	KEP-22/PM.223/ASPM-P/2019	Etriya	11-Dec-2019	11-Dec-2024
114.	KEP-21/PM.223/ASPM-P/2019	Ely Aswita	26-Nov-2019	26-Nov-2024
115.	KEP-23/PM.223/ASPM-P/2019	Harjum Muharam	20-Dec-2019	20-Dec-2024



# Direktorat Pasar Modal Syariah



**Fadilah Kartikasasi**  
Direktur Pasar Modal Syariah



**Muhammad Touriq**  
Deputi Direktur Pasar Modal Syariah



**Arif Machfoed**  
Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah



**Dyah Mustika**  
Kepala Bagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah



**Dien Sukmarini**  
Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan dan Informasi Pasar Modal Syariah



**Rani Permana**  
Kepala Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Pengelolaan Investasi



**Firman Nur Rahman**  
Staf Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Transaksi dan Lembaga Elek



**Syafri Hendrik**  
Kepala Subbagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah Bidang Pengelolaan Investasi



**Wuri Ekawati Putri**  
Kepala Subbagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah Bidang Emiten dan Perusahaan Publik



**Andry Wicaksono**  
Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah



**Pungkas Tri Widyatmodjo**  
Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Pasar Modal Syariah



**Kholid Akhsan**  
Kepala Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Pengelolaan Investasi



**Indriani Widyastuti**  
Kepala Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Emiten dan Perusahaan Publik



**Imam Widyanto**  
Kepala Subbagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah Bidang Pengelolaan Investasi



**Muhammad Musa**  
Kepala Subbagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah Bidang Emiten dan Perusahaan Publik



**Arief Hari Wibowo**  
Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah



**Bayu Kurniawan**  
Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Pasar Modal Syariah



**Risa Arivianto**  
Kepala Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Transaksi dan Lembaga Elek



**Erlisa Diah Pertiwi**  
Kepala Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Emiten dan Perusahaan Publik



**Manda Khairatul Aulia**  
Kepala Subbagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah Bidang Pengelolaan Investasi



**Nurul Adilah**  
Kepala Subbagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah Bidang Emiten dan Perusahaan Publik



**Nadhifa Alim Hapsari**  
Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah



**Gita Armitawati**  
Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Pasar Modal Syariah